

**Analisis Putusan Homologasi Atas Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-
PKPU/2017/PN Niaga Smg)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu**



Oleh:

Ahmad Diha'ul Khoiri
1502056016

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARAN
2019**

Drs. H. Sahidin, M.Si.
JL. Merdeka Utara 1/B.9 Ngaliyan Semarang
Siti Rofiah SH, MH
Perum Pesona Asri II Blok f No.7 RT5/RW6 Pedurungan Semarang

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 Ekslembar
Prihal : Nakah Skripsi
A.n. Sdr. Ahmad Diha'ul Khoiri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum, Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan memberikan bimbingan, koreksi seperlunya, bersama ini kami sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Diha'ul Khoiri

NIM : 150056016

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Putusan Homologasi Atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PNNiaga Smg)

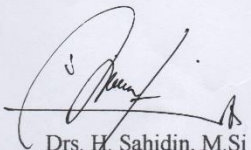
Dengan ini memohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut diatas, dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian persetujuan ini kami buat. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb


Semarang, 16 Oktober 2019

Pembimbing I



Drs. H. Sahidin, M.Si
196910311995031002

Pembimbing II



Siti Rofiah SH, MH
19860106201503003



HALAMAN PENGESAHAN

Dengan ini mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Ahmad Diha'ul Khoiri
NIM : 1502056016
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **Analisis Putusan Homologasi Atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada tanggal 18 Oktober 2019

Demikian dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Program Sarjana Strata I (S.I) guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum

Semarang, 18 Oktober 2019

Mengetahui

Ketua Sidang

MOH. KHASAN, M. Ag
NIP. 197412122003121004

Sekretaris Sidang

Drs. H.SAHIDIN, M.Si
NIP. 196703211993031005



Penguji Utama I

MOH. ARIFIN, SAg., M.Hum
NIP. 197110131997031002

Penguji Utama II

NOVITA DEWI MASYITOH,SH.,MH
NIP. 197910222007012011

Pembimbing I

Drs. H.SAHIDIN, M.Si
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

SITI ROFIAH, MH.
NIP. 198601062015032003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-
akad itu."*

(Qs. al Maidah: 1)¹

¹ Qs. Al Maidah: ayat 1

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat hidayah dan karunianya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, untu itu penulis persembahkan skripsi ini untuk mereka yang selalu memberikan doa, bantuan dan inspirasi yang tak kan pernah ternilai harganya, diantaranya:

1. Bapak dan Ibu yang selalu berkorban memberikam kasih sayang, dukungan materi, tenaga pikiran serta doa yang tidak pernah putus mengiringi setiap langkah kehidupan penulis. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan, kesejahteraan serta selalu dilimpahkan kebahagiaan didunia maupun diakhirat
2. Adik kandung penulis yang selalu selalu penulis cintai dan kasihi

3. Kelurga besar Pariman yang selalu memberikan dukungan doa dan motivasi kepada penulis damal mengarungi kehidupan didunia
4. Alamamater tercinta, khususnya keluarga program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisnong yang selama ini sudah berkenan menjadi tempat untuk penulis menuntut ilmu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Oktober 2019
Deklarator



Ahmad Diha'ul Khoiri
1502056016

ABSTRAK

Sebelum putusan homologasi perkara nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg, terlebih dahulu kreditur mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Semarang yang menjadi kompetensi relatifnya. Permohonanan PKPU diajukan oleh Christ Setiawan, Direktur Utama PT. Mitra Setia Jaya karena mempunyai piutang yang belum dibayar dan telah jatuh tempo serta mengganggu PT Industri Gula Nusantara (PT IGN) selaku debitur tidak mampu lagi membayarnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa kali kreditur mengirim surat peringatan dan somasi kepada debitur dan juga didukung oleh beberapa pemberitaan dari surat kabar yang menyebut PT IGN sedang kesulitan dan keuangan hingga terancam bangkrut. Selanjutnya atas permohonan tersebut Majelis Hakim mnegabulkan permohonan kreditur dan menyatakan debitur dalam masa PKPU sementara. Dalam proses PKPU sementara debitur mengajukan rencana perdamaian yang disetujui oleh mayoritas kreditur. Atas persetujuan tersebut Majelis Hakim memutus homologasi perjanjian perdamaian antara debitur dan para kreditur. Adapun fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses permohonan PKPU hingga putusan homologasi, serta bagaimana pertimbangan dalam memutus perkara ini hingga bagaimana mekanisme yang digunakan debitur dalam melunasi utang-utangnya kepada para kreditur.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif (*Normatif Law Research*) dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan menghasilkan data bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Metode pengumpulan data berupa studi dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan PKPU yang diajukan kreditur telah memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan pada pasal 222 UUK-PKPU sehingga tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak permohonan PKPU dari kreditur. Akibat dikabulkannya permohonan debitur berada dalam masa PKPU sementara dan mengharuskan debitur mengajukan rencana perdamaian yang pada akhirnya disahkan oleh majelis hakim dalam putusan homologasi. Pertimbangan hakim dalam memutus homologasi perkara ini adalah dengan mendengarkan rekomendasi dari hakim pengawas dan pengurus serta perjanjian perdamaian yang dianggap telah sesuai sebagaimana dijelaskan dalam pasal 281 ayat 1. Didalam perjanjian perdamaian terdapat mekanisme pembayaran utang yang ditawarkan debitur kepada kreditur yang meliputi pembayaran utang dengan cara diangsur dan para kreditur dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah piutang yang dimiliki. Terkait dana yang digunakan untuk melunasi utangnya, debitur mendapatkan suntikan dana dari investor baru.

Kata kunci: PKPU, Homologasi, Penyelesaian Utang Piutang

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, ridho, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Putusan Homologasi Atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg). Tak lupa juga shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi penulis dan seluruh umat islam.

Ucapan terima kasih yang paling dalam penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis yang telah mencurahkan kasih sayang, doa, perhatian dan pengorbanan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Serta kepada saudara-saudara dan keluarga besar yang selalu mendukung doa dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam proses penyusunan skripsi juga tidak lepas dari dukungan dan motifai ari

berbagai pihak yang senantiasa sabar dan tulus membimbing penulis sehingga halangan dan rintangan yang dihadapi penulis dapat dilalui penulis dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Sahidin, M. Si dan Ibu Siti Rofi'ah MH., M.SI selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi
2. Ibu Hj Brilian Erna Wati. SH. MH dan Ibu Hj Nurhidayati Setyani SH. MH selaku Kepala Jurusan dan Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
3. Ibu Novita dewi Masitoh yang telah sabar mendengarkan keluh kesah dan masukan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi

4. Bapak Edy Suwanti SH. MH, Bapak Wisminoto dan Bapak Afdlori SH.MH selaku Hakim dan Panitera Muda Pengadilan Niaga Semarang yang telah bersedia membantu proses pengambilan data terkait penyusunan skripsi penulis di Pengadilan Niaga Semarang
5. Bapak Saksono Yudiantoro. SH. MH, Bapak Slamet Rijadi. SH, Bapak Agus Suhartoyo SH. dan Mbak ita selaku pengacara dan staf di kantor Advokat Saksono Yudiantoro. SH, MH. & Associates yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian ditempatnya

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan sehingga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis juga menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak keterbatasan penulis dalam mencari data lapangan. Atas keterbatasan tersebut penulis mengharapkan masukan kritik dan saran yang menunjang demi kesempurnaan

skripsi ini. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya

Semarang...

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------|-------------|
| PERSETUJUAN SKRIPSI..... | I |
| HALAMAN PENGESAHAN | II |
| MOTTO..... | III |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | IV |
| DEKLARASI | V |
| ABSTRAK..... | VI |
| KATA PENGANTAR | VII |
| DAFTAR ISI..... | VIII |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| Rumusan Masalah | 5 |
| Tujuan Penelitian..... | 6 |
| Manfaat Penelitian..... | 6 |
| Telaah Pustaka..... | 7 |
| Metode Penelitian..... | 13 |
| Sistematika Penulisan..... | 21 |

BAB II PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, HOMOLOGASI DAN KEPAILITAN23

Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .23

1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang23

2. Asas-asas Penundaan Keajiban Pembayaran Utang dan

Kepailitan di Indonesia.....25

3. Para Pihak dalam PKPU27

4. Syarat dan Prosedur Permohonan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang37

5. Jenis-Jenis Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang44

6. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran

7. Utang50

8. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang52

| | |
|--|----|
| 9. Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang..... | 55 |
| A. Tinjauan Umum Homologasi | 59 |
| 1. Pengesahaan Perdamaian dan Akibat Hukumnya | 59 |
| 2. Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian | 61 |
| B. Tinjauan Umum Kepailitan..... | 62 |
| 1. Pengertian Kepailitan..... | 62 |
| 2. Tujuan dari Hukum Kepailitan | 63 |
| 3. Kepailitan Akibat Penolakan Pengesahan Perdamaian | 64 |

**BAB III PUTUSAN HOMOLOGASI NOMOR 09/PDT.SUS-
PKPU/2017/PN NIAGA SMG ATAS PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG 67**

| | |
|---|----|
| A. Profil Pengadilan Negeri Semarang..... | 67 |
| B. Kronologi Putusan Homologasi Nomor 09/Pdt.Sus- PKPU/2017/PN Niaga Smg | 78 |
| 1. Para Pihak..... | 78 |

| | |
|--|----|
| 2. Isi Putusan | 81 |
| 3. Petimbangan Hakim. | 92 |
| C. Mekanisme Penyelesaian Utang Piutang dalam Perkara Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg | 95 |

BAB IV ANALISIS PUTUSAN HOMOLOGASI NOMOR 09/PDT.SUS-PKPU/2017/PN NIAGA SMG ATAS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG¹⁰³

| | |
|--|-----|
| A. Analisis Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hingga Putusan Homologasi | 103 |
| B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Homologasi Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg | 116 |
| C. Analisis Mekanisme Penyelesaian Utang dalam Perjanjian Homologasi Nomor 09/Pdt.Sus- PKPU/2017/PN Niaga Smg..... | 125 |

BAB V PENUTUP 131

A. Kesimpulan 131

B. Saran..... 133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan yang mengalami kerugian yang mengarah pada kesulitan likuiditas akan sangat mempengaruhi kemampuan dari perusahaan dalam hal melaksanakan kegiatan usahanya serta membayar semua kewajiban yang dia miliki. Posisi likuiditas yang buruk akan berdampak kepada ketidak mampuan perusahaan dalam membayar gaji karyawan, membayar pajak perusahaan dan juga membayar utang-utangnya kepada pihak kreditur.¹ Ketidak mampuan tersebut akan berakibat perusahaan terancam pailit yang berdampak pada dilikuidasinya harta kekayaan perusahaan atas permohonan para krediturnya yang diajukan kepada Pengadilan Niaga. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian yang pelunasannya dapat ditagih dimuka Pengadilan,² sedangkan kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian yang dapat ditagih dimuka Pengadilan.³

Dalam mengatur perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pemerintah mempunyai landasan hukum berupa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut UUK-PKPU. Atas dasar tersebut apabila terjadi permasalahan dalam hal penyelesaian utang piutang antara

¹MunirFuady, *HukumPailitdalamTeoridan Prakek*, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2014), 175.

² Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

debitur dan kreditur dapat menggunakan sarana hukum berupa upaya Kepailitan dan upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut (PKPU).

Menurut Pasal 1 Ayat 1 UUK-PKPU Kepailitan adalah putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas semua kekayaan debitur pailit baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pailit adalah yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mampu melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya.⁴

Sedangkan dalam UUK-PKPU definisi PKPU tidak dijelaskan secara eksplisit, kendati demikian dalam rumusan peraturan Pasal 222 ayat 2 dan 3 UUKPKPU dapat dilihat bahwa PKPU adalah upaya dari debitur maupun kreditur apabila memperkirakan debitur tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih agar mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.⁵ Sementara dalam bukunya Munir Fuady menjelaskan PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut para pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh

⁴ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008), 01

⁵Pasal 222 ayat 2 dan 3 Undang Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.⁶

Permohonan Kepailitan dan Permohonan PKPU tentu mempunyai dampak yang berbeda terhadap debitur sebagai perusahaan, apabila Permohonan kepailitan yang akan berakhir dengan debitur dinyatakan pailit, Permohonan PKPU justru membantu debitur terhindar dari pernyataan pailit, hal ini bisa terjadi dikarenakan dalam proses PKPU debitur diberikan kesempatan untuk melakukan reorganisasi usaha atau manajemen perusahaan atau restrukturisasi utang-utangnya dalam tenggang waktu PKPU, yang pada akhirnya akan dapat meneruskan kegiatan usahanya dan memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Mekanisme PKPU dalam praktik merupakan solusi yang baik, tidak hanya bagi debitur untuk bisa terhindar dari keadaan pailit, namun secara sosial dan ekonomi menjadi solusi karyawan dan *stakholder* lainnya.⁷

Salah satu permohonan PKPU yang diajukan para kreditur dikarenakan debitur tidak memenuhi kewajibannya adalah permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 September 2017 dengan daftar perkara Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg. Menurut naskah Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg, proses PKPU dalam permohonan tersebut melibatkan Christ Setiawan selaku Direktur Utama PT. Mitra Setia Jaya, beralamat di Jl. Gajah No.28, Kav. Ruko B 9 Semarang, (selanjutnya disebut pemohon PKPU) dengan PT. Industri Gula Nusantara, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta

⁶ MunirFuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, 175.

⁷ I Wayan Wesna Astara, *Hukum Kepailitan Teori dan Praktek*, (Denpasar, Warmadewa University Press, 2018), 29

Barat Km-6 Cepiring Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah (Selanjutnya disebut termohon PKPU).

Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon selaku kreditur yang mempunyai piutang sebesar Rp. 4.151.581.500,- (empat milyar seratus lima puluh satu juta limaratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Selain itu debitur juga mempunyai utang kepada PT. Garuda Mas Trasindo dan PT. Nusantara Tour berjumlah Rp 5.397.055.950 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang sudah jatuh tempo. PKPU yang diajukan oleh Pemohon selanjutnya diterima oleh Pengadilan Niaga Semarang dan mengabulkan seluruh permohonan pemohon untuk seluruhnya dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang. Pada hari Rabu tanggal .4 Oktober 2017 oleh, Edy Suwanto. SH, MH., sebagai Hakim Ketua, Pudjo Hunggul HW, SH.MH. dan Wismonoto. SH dengan demikian kreditur dan debitur berada dalam masa PKPU Sementara.

Berdasarkan keadaan tersebut debitur selaku termohon pada rapat kreditur mengajukan sebuah proposal rencana perdamaian yang pada pokoknya berisi penawaran-penawaran pembayaran atau skema restrukturisasi utang yang komprehensif dan memiliki kepastian hukum kepada para krediturnya. Sehingga pada akhirnya proposal perdamaian dari debitur diterima oleh para krediturnya dan disahkan menjadi perjanjian perdamaian dalam sidang homologasi.

Proses PKPU dalam putusan Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg, merupakan peristiwa hukum yang menarik untuk dikaji, sebab dari

pengamatan penulis dan menurut beberapa kabar berita online,⁸Sebelum proses PKPU diajukan tepatnya pada tahun 2016 hingga Putusan Homologasi disahkan oleh Majelis Hakim, PT Industri Gula Nusantara selaku termohon/debitur mengalami vakum produksi dan kesulitan keuangan yang berakibat para karyawan dirumahkan hingga terancam bangkrut.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji mengenai proses permohonan PKPU hingga PKPU disahkan menjadi Perjanjian Homlogasi dalam bentuk Penelitian Skripsi dengan judul “Analisis Putusan Homologasi Atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg), dan akan diuraikan dalam beberapa rumusan masalah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara penundaan kewajiban pembayaran utang sampai dengan putusan homologasi perkara nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg.?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim atas putusan nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg.?
3. Bagaimana mekanisme eksekusi penyelesaian utang perkara nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg?

⁸<https://radarpekalongan.co.id/45509/tiga-tahun-mandeg-pabrik-gula-kendal-kembali-beroperasi/>, <https://kabar24.bisnis.com/read/20171109/16/707800/arta-graha-network-selamatkan-pt-industri-gula-nusantara>, <https://money.kompas.com/read/2016/01/05/141500726/Bangkrut.Pabrik.Gula.Cepiring.PHK.Semua.Karyawan>, <https://jateng.tribunnews.com/tag/pt-industri-gula-nusantara-ign> diakses 5 September 2019

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakiakatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti.⁹ Selain itu, arah penelitian juga ditentukan oleh tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara jelas dan rinci proses dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sampai putusan homologasi dalam Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg.
2. Untuk mengetahui secara jelas dan rinci dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg.
3. Untuk mengetahui secara jelas dan rinci proses penyelesaian utang mlalui putusan homologasi Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah pandangan subjektif dari penelitian, sehingga manfaat penelitian setiap peneliti mempunyai *statement* dan jumlah yang berbeda mengenai manfaat penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, untuk dua aspek, yakni :

1. Manfaat secara akademik diharapkan menjadi sumbangan bagi *khazanah* keilmuan dalam bidang Ilmu Hukum dalam hukum perdata khususnya hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang permasalahannya selalu mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan.

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, UI Press, 1983)., 18

¹⁰Mukti Fajar & Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010)., 90

2. Manfaat secara praktis yakni menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca dalam hal Hukum Acara Perdata dan Hukum Niaga khususnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sehingga pembaca dan masyarakat umum dapat mengetahui Proses dalam PKPU dan dapat dijadikan rujukan dan referensi dalam penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai Homologasi dalam PKPU umumnya merupakan permasalahan yang sudah beberapa kali dibahas oleh para peneliti dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya. Akan tetapi dengan adanya hal tersebut penulis akan melakukan suatu penelitian yang berbeda mulai dari perbedaan fokus penelitian sampai locus penelitian.

Karena judul penelitian penulis merupakan suatu yang baru di UIN Walisongo Semarang, hasil pengamatan kepustakaan di jurnal Al-ahkam UIN Walisongo penulis tidak menemukan penelitian jurnal, skripsi, tesis, disertasi yang sama maupun bersinggungan dengan judul penelitian penulis. Selanjutnya penulis melakukan pengamatan lebih luas lagi melalui internet hingga penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan judul penelitian penulis dan penulis deskripsikan beberapa penelitian tersebut dalam daftar pustaka sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rifki Rahmadani Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2018

Dalam skripsinya yang berjudul *Akibat Hukum Bagi Kreditur dalam Kasus (PT. First Travel) Ditinjau dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 105/Pdt.SUS-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst)* permasalahan yang diteliti yaitu: mengenai perjanjian PKPU dari debitur dapat menanggukkan pembayaran utang terhadap kreditur konkuren, akibat hukum dari PKPU terhadap debitur dan kreditur, dan upaya pertanggungjawaban dari debitur dalam pelunasan terhadap kreditur.

Hasil penelitian perjanjian perdamaian PKPU mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila perjanjian tersebut telah disepakati oleh para pihak dan telah disahkan oleh pengadilan, akibat hukum debitur wajib melunasi utangnya kepada kreditur, upaya pelunasan utang dengan cara mencari biro perjalanan umroh lain dengan dibiayai First Travel.¹¹

Perbedaan dengan penelitian penulis yang sangat mencolok terdapat putusan yang dikaji, selanjutnya pada perbedaan fokus penelitian yang mana pada penelitian ini fokus kajian kepada status para debitur dan kreditur, dan persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada mekanisme penyelesaian utang didalam perjanjian perdamaian.

¹¹Rifki Rahmadani, *Akibat Hukum Bagi Kreditur dalam Kasus (PT. First Travel) Ditinjau dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 105/Pdt.SUS-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018

2. Penelitian yang dilakukan oleh Febri Yanti Casanova Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2017.

Dalam skripsinya yang berjudul Analisis Putusan Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Pencegah Terjadinya Kepailitan (Studi Putusan No. 59/pdt.sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst) penelitian ingin mengkaji dan membahas tentang proses pengajuan permohonan PKPU, Proses Homologasi dalam PKPU dan akibat hukum yang ditimbulkan dari Homologasi.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa PKPU terjadi sejak diajukannya permohonan PKPU oleh pemohon yang disebabkan gagal bayar terhadap perjanjian sewa infrastruktur telekomunikasi yang dilakukan oleh termohon atas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Permohonan tersebut telah memenuhi syarat pokok dalam mengajukan permohonan PKPU sehingga tidak ada alasan hakim untuk menolak.

Selanjutnya, proses penyelesaian utang melalui PKPU dimulai sejak termohon mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada para kreditur yang selanjutnya dilakukan restrukturisasi utang yang meliputi pemotongan pokok pinjaman dan pengurangan tingkat suku bunga, perpanjangan jangka waktu pelunasan, konversi utang kepada saham dan pembebasan utang.

Akibat hukum yang ditimbulkan adalah mengesahkan perjanjian perdamaian, menyatakan bahwa status PKPU yang dimohonkan kepada termohon berakhir dan para kreditur berhak mendapatkan haknya sebagaimana yang ditentukan dalam putusan pengesahan perdamaian serta membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 1.327.000,00 kepada termohon.¹²

Perbedaan dengan penelitian penulis paling jelas terlihat pada perbedaan putusan pengadilan yang dikaji, dan juga perbedaan pada fokus penelitian yang mana fokus penelitian penulis lebih kepada jalan peristiwa hukum dalam proses PKPU sampai kesepakatan dalam pelunasan utang kepada para kreditur. Sedangkan persamaannya terdapat pada fokus kajian yang sama-sama mengkaji putusan homologasi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Desty Ayu Saraswati, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2018

Dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Yuridis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Koperasi Simpan Pinjam Mitradana Semarang (Studi Kasus Putusan No. 01/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.SMG) permasalahan yang diteliti yaitu proses pengajuan PKPU dan pertimbangan Hakim dalam menentukan putusan PKPU.

Hasil penelitian bahwa proses Penundaan PKPU pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra dana telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam

¹²Febri Yanti Casnova, *Analisis Putusan Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Pencegah Terjadinya Kepailitan (Studi Putusan No. 59/pdt.sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst)*, Skripsi: Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sedangkan pertimbangan Hakim dalam menentukan putusan adalah dengan melihat bagaimana proses pembuktian di persidangan yang dilakukan oleh para pihak dan bukti-bukti berdasarkan fakta serta alasan-alasan dari para pihak.¹³

Perbedaan dengan penelitian penulis yang paling jelas terdapat dalam Putusan yang dikaji, meskipun sedikit ada relevansi dengan penelitian penulis terkait kajian dalam proses PKPU dan pertimbangan hakim akan tetapi juga terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yakni, penelitian penulis juga mengkaji proses penyelesaian utang oleh debitur.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ishak Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, tahun 2016

Dalam Jurnal Hukumnya yang berjudul Perdamaian Antara Debitur dan Kreditur Konkuren dalam Kepailitan. Permasalahan yang diteliti adalah tentang debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga dan penawaran perdamaian oleh debitur kepada kreditur konkuren.

Hasil penelitian Debitur dan kreditur konkuren dapat menyelesaikan utang piutang secara kepailitan melalui pengadilan niaga dan penyelesaian dengan cara tersebut dapat memberi keadilan diantara para kreditur. Apabila debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, maka menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan baginya. Debitur agar dapat terhindar dari akibat hukum

¹³ Desty Ayu Saraswati, *Tinjauan Yuridis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dana Semarang (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg)*, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

putusan pailit, maka debitur dapat menawarkan perdamaian kepada kreditur konkuren. Apabila perdamaian yang ditawarkan debitur disetujui para kreditur konkuren dan disahkan oleh pengadilan niaga, maka berakhir kepailitan dan debitur kembali dalam keadaan tidak pailit.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian penulis terdapat pada fokus penelitian yang lebih kepada perdamaian setelah kreditur di putus pailit.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rindy Ayu Rahmadiyah, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2015

Dalam Jurnal Hukum yang berjudul “Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur Oleh Kreditur Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Permasalahan yang hendak diteliti adalah mengkaji dan menganalisis proposal rencana perdamaian debitur pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang ditolak oleh kreditur dan akibat hukumnya.

Hasil penelitian perdamaian pada proses PKPU yang meliputi tawaran pembayaran yang berbentuk restrukturisasi utang dan perusahaan yang pada akhirnya ditolak oleh lebih dari setengah kreditur konkuren dan kreditur separatis. Akibat hukum bagi debitur karena proposal perdamaian ditolak adalah debitur langsung dijatuhi pailit dengan segala akibat hukumnya.

Perbedaan dengan penelitian penulis terdapat pada fokus kajian yang mana dalam penelitian ini mengkaji rencana perdamaian yang

¹⁴ Ishak, *Perdamaian Antara Debitur dan Kreditur Konkuren dalam Kepailitan*, Kanun Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016

tertolak sedangkan penelitian penulis fokus kajian kepada rencana perdamaian yang diterima dan akhirnya diputus homologasi. Sedangkan persamaaan dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini juga mengkaji proses PKPU dari awal permohonan hingga berakhirnya masa PKPU.¹⁵

Dari semua penelitian diatas ataupun penelitian terdahulu, penelitian penulis mempunyai sudut pandang masalah yang berbeda yang meliputi, lokus penelitian dan putusan pengadilan yang dikaji dalam penelitian, meski ada beberapa penelitian yang fokus penelitian terkait homologasi sedikit bersinggungan. Meskipun demikian isi dan hasil dari penelitian tentu akan berbeda, karena ada ketersinggungan nantinya penelitian tersebut akan digunakan rujukan dalam penulisan penelitian. Dan dari uraian diatas tentunya penelitian penulis sudah memenuhi unsur kebaruan sebagai syarat suatu karya ilmiah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian normatif (*normatif law research*), karena obyek dari penelitian adalah putusan Pengadilan Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg. Penelitian dan hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang mencakup, penelitian terhadap asas-asas hukum,

¹⁵Rindy Ayu Rahmadiyanti, "Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor Oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Notarius*, Edisi 8, No. 2 (September, 2015)..E-Journal Undip, 252

sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.¹⁶

Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum bagi sistem norma yang digunakan untuk memberikan *justifikasi* prespetif tentang suatu peristiwa hukum, sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan adalah bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan. Karena itu, apabila suatu isu hukum dilihat dari beberapa pendekatan yang berbeda maka hasilnya atau kesimpulannya akan berbeda pula. Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan antara lain, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan sejarah, pendekatan filsafat, pendekatan kasus.¹⁸

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasu yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan yang telah

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo, 1995)., 15

¹⁷Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, (Jakarta, Grafika, 2003)., 419

¹⁸ Mukti Fajar & Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*., 184

mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus mengkaji pertimbangan (*ratio decidendi* atau *reasoning*) dari hakim dalam memutus suatu perkara.¹⁹

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian yakni, penelitian langsung di dalam masyarakat.²⁰

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan Hakim, Panitera dan Advokat.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Putusan Pengadilan Niaga Semarang nomor perkara 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN/Niaga/Smg, data sekunder dalam penelitian merupakan data pelengkap yang diperoleh dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang pada umumnya sudah tersedia oleh pihak lain dan sudah diolah yang mencakup dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.²¹

4. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah aturan-aturan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁹ *Ibid.*, 190-191

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 49

²¹ *Ibid.*,

Bahan Hukum Primer merupakan seluruh aturan hukum yang dirancang serta di buat secara resmi oleh lembaga negara, dan atau lembaga/badan pemerintahan yang dalam segi penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksaan yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Bahan hukum primer bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undang dan putusan-putusan hakim.²² Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang perseroan Terbatas
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kiitab Undang-Undang Acara Perdata
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2016 tentang peningkatan efisiensi dan transparansi penanganan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- 5) Putusan Pengadilan No.09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN/Niaga/Smg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang ada

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011)., 93

hubungannya dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum juga merupakan hasil kegiatan teoritis akademis yang mengimbangi kegiatan–kegiatan praktik legislatif atau praktik yudisial juga.²³ Adapun Bahan Hukum Sekunder antara lain buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, bulletin-bulletin atau terbitan-terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi dan lain-lain.

Bahan-bahan hukum sekunder ini memang bukan merupakan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam maknanya yang materiil, bahan-bahan hukum sekunder ini memang merupakan bahan yang berguna sekali untuk meningkatkan mutu hukum positif yang berlaku. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu, Buku, Jurnal, dan Skripsi terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti jurnal, website, surat kabar, Istilah Hukum & Peraturan Perundang-Undangan Terbaru karya Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A, KBBI karya Balai Pustaka, Kamus Hukum karya Andi Hamzah (Ghalia Indonesia; 1986)

5. Teknik Pengumpulan Data.

a. Studi Dokumentasi

²³Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), 155.

Studi dokumentasi adalah penelusuran dokumen, adapun dokumen primer dalam penelitian ini adalah naskah Putusan pengadilan No.09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN/Niaga/Smg, yang diakses dan didapat dari Pengadilan Negeri Semarang.

b. Wawancara (interview)

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan informasi yang yang dibutuhkan dalam penelitian untuk selanjutnya dipakai sebagai tri angulasi. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang dengan Hakim dan atau Panitera sebagai informannya dan tidak menutup kemungkinan akan wawancara dengan pihak lain yang terkait dengan putusan No.09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN/Niaga/Smg

6. Teknik Pengujian Data

Data yang diharapkan adalah data yang valid dan reliabel, artinya data tersebut dapat menggambarkan kondisi objek penelitian dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu validitas dan reliabilitas data sangat dibutuhkan. Disamping itu, data yang didapatkan nantinya harus ada keterkaitannya dengan topik atau permasalahan yang diajukan dan antara data satu dengan data lainnya serta dengan bahan hukum harus ada hubungan satu sama lain.²⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data. Sampai saat ini, konsep Norman K Denkin ini

²⁴ Mukti Fajar & Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.*, 176

dipakai oleh para peneliti kualitatif di berbagai bidang. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: triangulasi metode, triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), triangulasi sumber data, dan triangulasi teori.

Adapun jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.²⁵

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan dalam menyajikan hasil temuan kepada orang lain.²⁶ Setelah mendapatkan seluruh data dari sumber data primer maupun sekunder dari sumber data telah diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data. Selanjutnya di elaborasikan

²⁵ Mudjia Rahadjo, *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*, <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/1/triangulasi.pdf>, diakses pada tanggal 20 Oktober, 2019

²⁶ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 85

keduanya menjadi sebuah data yang bersifat analitik. Untuk memperjelas data peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif berbentuk deskriptif yang terkumpul dalam teknik pengumpulan data.

Adapun setelah semua data diperoleh serta metode ditentukan maka saatnya tahap pengelolaan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses data reduction terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih pilih.²⁷

Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode wawancara dan metode dokumenter. Semua data itu dipilih-pilih sesuai dengan masalah penelitian yang peneliti pakai. Data yang peneliti wawancara di lapangan juga dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Penyajian Data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 92

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Data yang peneliti sajikan adalah data dari pengumpulan data kemudian dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian, selanjutnya data itu disajikan (penyajian data). Dari hasil pemilihan data maka data itu dapat disajikan.²⁸

c. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing*)

Upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif. Prosesnya dimulai dari pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deskripsi yang sebelumnya masih remang-remang tapi setelah diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan

²⁸*Ibid.*, Hlm. 95

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.²⁹

Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas permasalahan mengenai prihal dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, maka sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bab Pertama : merupakan pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori/teah teori, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.
2. Bab Kedua: Merupakan landasan teori yang akan dibagi menjadi beberapa subbab yang meliputi: tinjauan umum PKPU, tinjaun umum homologasi, dan tinjauan mengenai kepailitan dan relevansinya dengan PKPU.
3. Bab Ketiga : Merupakan temuan dalam penelitian yang akan menjelaskan mengenai, profil Pengadilan Negeri, para pihak terlibat dan isi dalam putusan Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg, dan kronologi timbulnya sengketa, pertimbangan hakim dalam putusan.
4. Bab Keempat : Merupakan analisis terkait proses permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sampai perjanjian homologasi pertimbangan

²⁹*Ibid.*, Hlm. 99

hakim atas putusan Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg. dan mekanisme penyelesaian utang dalam Perjanjian Homologasi,

5. Bab Kelima : merupakan penutup meliputi kesimpulan dan saran/rekomendasi

Sedangkan bagian yang terakhir adalah bagian yang isinya meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biografi penulis.

BAB II

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, HOMOLOGASI DAN KEPAILITAN

A. Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Menurut Pasal 222 ayat 2 dan 3 Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut PKPU adalah upaya dari debitur maupun kreditur apabila memperkirakan debitur tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat mengajukan Permohonan PKPU dengan maksud agar debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.¹ Sementara dalam bukunya Munir Fuady menjelaskan PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut para pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.²

Istilah PKPU dalam perjalanannya mengalami beberapa kali perubahan. Sebelum istilah ini dirumuskan, dulu disebut dengan Pengunduran Pembayaran hal ini tertuang dalam Perubahan Nomor 49

¹ Pasal 222 ayat 2 dan 3 Undang Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

² MunirFuady,*HukumPailitdalamTeoridan Praktek*, 175.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Dalam PERPU tersebut istilah Pengunduran Pembayaran diganti menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan istilah ini berlaku hingga sekarang. Istilah ini merupakan terjemahan dari kata yang dalam bahasa Belanda disebut “*sursence van betaling*” atau dalam Bahasa Inggris disebut “*suspension of payment*”

PKPU pada hakikatnya bertujuan untuk mengadakan perdamaian antara debitur dengan para krediturnya guna untuk menghindarkan debitur yang akan mengalami insolvensi dan Kepailitan.³ Meskipun demikian PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitur saja, melainkan juga untuk kepentingan para krediturnya, khususnya kreditur konkuren.⁴ PKPU menurut Fred B,G Tumbunan, bertujuan menjaga jangan sampai seorang kreditur, yang karena suatu keadaan semisal keadaan likuid dan sulit memperoleh kredit, dinyatakan pailit, sedangkan bila debitur diberi waktu maka besar harapan ia dapat melunasi utang-utangnya. Pernyataan pailit dan keadaan seperti ini akan berakibat pengurangan nilai perusahaan, hal mana jelas merugikan para kreditur. Oleh karenanya, dengan memberi waktu dan kesempatan kepada debitur, diharapkan bahwa ia melalui reorganisasi usahanya dan atau

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta:PT Pustaka Utama Grafiti, 2009), 328

⁴ Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak mempunyai hak untuk menguasai jaminan berupa benda sehingga penyelesaian utang dilakukan setelah kewajiban terhadap kreditur lain,

restrukturisasi utang-utangnya dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian membayar lunas utang-utangnya.⁵

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam PKPU adalah debitur harus memiliki dua kreditur atau lebih, sehingga harus ada kreditur lain selain kreditur yang mengajukan permohonan PKPU. Syarat mengenai adanya minimal dua atau lebih kreditur dikenal sebagai *concursum creditorum*. Selama PKPU berlangsung debitur tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya. Semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang pun harus ditangguhkan pelaksanaannya.

2. Asas Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang di Indoensia

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Kepailitan dan PKPU ini didasarkan kepada beberapa asas, antara lain:⁶

a. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya

⁵ Lontoh, Rudy A, dkk, *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), 131-132

⁶Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditur yang tidak beritikad baik.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitur, dengan tidak mempedulikan Kreditur lainnya.

d. Asas Integritas

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai

sarana hukum untuk penyelesaian masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

3. Para Pihak dalam PKPU

Dalam proses PKPU terdapat beberapa pihak yang ikut terlibat dari pertama permohonan diajukan ke Pengadilan Niaga hingga permohonan tersebut di putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Para pihak tersebut terbagi kedalam beberapa posisi diantaranya:

a. Para pihak yang dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Pasal 222 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 223 Undang- Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu:

- 1) Debitur, yang dimana memiliki lebih dari satu kreditur, yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan untuk membayar utang-utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Debitur dapat mengajukan permohonan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) dengan mengajukan rencana perdamaian kepada kreditur terkait pembayaran utang yang dilakukan secara sebagian atau keseluruhan.
- 2) Kreditur, yang dimana kreditur memperkirakan debitur tidak dapat membayar utang-utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, hal tersebut memungkinkan kreditur untuk mengajukan permohonan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) terhadapdebitur. Kreditur dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terbagi menjadi 2 (dua) jenis Yaitu:

a) Kreditur Preferen (Preferential Creditur) ada 2 yaitu :

Kreditur pemegang hak jaminan (Hak tanggungan, Hipotik, Gadai & Fidusia) biasa disebut kreditur sparatis dan kreditur yang mempunyai hak preferensi atau hak untuk didahulukan pelunasan utangnya dari hasil harta Pailit dari pada pelunasan piutang para kreditur konkuren (misalnya Kantor Pajak, Buruh, Imbalan Kurator, Kantor Lelang)

b) Kreditur konkuren yaitu kreditur yang tidak mempunyai hak untuk menguasai jaminan berupa benda sehingga penyelesaian utang dilakukan setelah kewajiban terhadap kreditur lain.

3) Bank Indonesia untuk debitur yang merupakan Bank

4) Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) untuk debitur yang merupakan Perusahaan Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, dan Lembaga Penjamin dan Penyimpanan

5) Menteri keuangan untuk debitur yang merupakan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam kepentingan publik.

Setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terjadi peralihan kewenangan yang dimana dari Menteri keuangan dan BAPEPAM-LK ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan sektor pasar modal, perasuransian,

dana pensiun, lembaga keuangan lainnya, hal ini berlaku juga terhadap fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK (Pasal 55 UU No. 21 tahun 2001 tentang OJK)

Dengan berlakunya Undang- Undang tersebut maka untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap lembaga diatas dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan(OJK).⁷ Selain para pihak diatas yang dapat mengajukan PKPU, terdapat juga para pihak lain yang ikut andil dan terlibat dalam proses PKPU sehingga proses PKPU bisa berjalan sesuai prosedur dan berakhir dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum. Para pihak tersebut mempunyai kedudukan, tugas, wewenang dan fungsinya yang berbeda, dan terbagi menjadi beberapa posisi diantaranya:

b. Hakim Pengadilan Niaga,

Hakim yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Ketua Mahkamah Agung. Untuk dapat menjabat sebagai Hakim Niaga. Dengan demikian Ketua Mahkamah Agung yang berwenang mengangkat Hakim Pengadilan Niaga bukan pejabat atau lembaga lainnya, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam Pasal 302 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang (UUK-PKPU) diantaranya:

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016),. 227

- 1) Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum.
- 2) Mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga.
- 3) Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercel; dan
- 4) Telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan Niaga.

Untuk menjadi Hakim Pengadilan Niaga dapat pula diangkat Hakim *ad hoc*. Hakim ahli yang pengangkatannya dilakukan dengan keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung, sepanjang memenuhi persyaratan sebagai hakim niaga dengan pengecualian berpengalaman sebagai Hakim pada Peradilan Umum. Tugas dari Hakim Pengadilan Niaga yang ditunjuk menjadi Majelis Hakim dalam perkara PKPU adalah menerima, memeriksa dan memutus permohonan PKPU.

c. Hakim Pengawas

Adalah Hakim Pengadilan Niaga yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan Pailit atau putusan PKPU, bersama dengan debitur dan pengurus mengurus harta debitur. Adapun kewajiban dan wewenang Hakim Pengawas dalam UUK sebagai berikut:⁸

- 1) Bersama-sama dengan pengurus dan debitur mengurus harta debitur (Pasal 214 ayat 2)

⁸Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, 110-111

- 2) Mendengar saksi atau berwenang memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut PKPU (Pasal 217D Ayat 1)
- 3) Memberikan persetujuan tindakan pengurus (Pasal 222 ayat 2)
- 4) Dapat melakukan kewenangan Pengadilan Niaga memasukkan ketentuan-ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan para kreditur setiap waktu, selama ada PKPU berdasarkan prakarsa hakim pengawas, permintaan pengurus, atau permintaan satu atau lebih kreditur (Pasal 223)
- 5) Dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan mengenai keadaan harta debitur dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh hakim pengawas (pasal 224 ayat 1)
- 6) Memperpanjang jangka waktu pelaporan keadaan harta debitur oleh pengurus (Pasal 225 ayat 2)
- 7) Memberikan persetujuan kepada debitur untuk membebaskan harta debitur dengan hak agunan atas kebendaan (pasal 226 ayat 4)

Setelah disahkan dan diundangkannya UUK-PKPU tugas Hakim pengawas mirip dengan tugas Hakim pengawas dalam kepailitan.⁹

d. Kepaniteraan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Panitera disebut pejabat kantor sekretariat pengadilan yang bertugas pada bagian

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 426

administrasi pengadilan, membuat berita acara persidangan, dan tindakan administrasi lainnya. Dalam menjalankan tugasnya Panitera biasa dibantu oleh beberapa orang Panitera Muda dan Panitera Pengganti. Jabatan panitera terdapat di lingkungan Pengadilan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.¹⁰

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Negeri seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: .warga negara Indonesia, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum, berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Negeri, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tinggi (pasal 28 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum).

Dalam proses PKPU tugas dan kewajiban panitera diatur secara eksplisit oleh UUK-PKPU sebagai berikut:

- 1) Panitera membantu hakim dalam menjalankan tugasnya (pasal 301 ayat 3 UUK-PKPU)
- 2) Panitera Pengadilan wajib mengadakan daftar umum perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dengan mencantumkan, tanggal putusan PKPU sementara/tetap berikut perpanjangannya, kutipan putusan Pengadilan, nama Hakim Pengawas dan Pengurus yang diangkat, ringkasan isi perdamaian dan pengesahan

¹⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/Panitera> diakses 7 september 2019

perdamaian oleh Pengadilan; dan penghakhiran perdamaian (Pasal 232 ayat 1 UUK-PKPU).

- 3) Panitera Pengadilan wajib menyediakan daftar umum perkara penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma (Pasal 232 ayat 3 UUK-PKPU).
- 4) Kepaniteraan menerima dan menjadi tempat para pihak dalam hal; debitur menyediakan surat permohonan PKPU berikut lampirannya (pasal 225 ayat 1 UUK-PKPU), ahli menyediakan laporannya terkait keadaan harta debitur a (pasal 238 ayat 3 UUK-PKPU), pengurus melaporkan keadaan harta debitur setiap 3 bulan (Pasal 239 ayat 1 UUK-PKPU), Pengurus menyediakan salinan daftar piutang (pasal 276 ayat 1 UUK-PKPU) Salinan berita acara rapat (pasal 282 ayat 3 UUK-PKPU)
- 5) Menerima Permohonan Peninjauan Kembali berikut bukti pendukung dan selanjutnya mendaftarkan permohonan peninjauan kembali pada tanggal permohonan diajukan dan menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada Panitera Mahkamah Agung (pasal 296 ayat 3,4,5 UUK-PKPU)
- 6) Panitera Pengadilan menyampaikan salinan permohonan Peninjauan Kembali berikut salinan bukti pendukung kepada termohon dan Panitera Pengadilan wajib menyampaikan jawaban termohon kepada Panitera Mahkamah Agung (pasal 297)

e. Pengurus

Adalah perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang telah terdaftar dalam Departemen Kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam rangka mengurus harta debitur. Pada dasarnya tugas pengurus mirip dengan tugas kurator atau BHP dalam kepailitan. Dari UUK-PKPU dapat diketahui secara rinci tugas, kewajiban dan wewenang Pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni:

- 1) Tugas pokok Pengurus adalah membantu Hakim Pengawas bersama-sama dengan debitur dan mengurus harta debitur (Pasal 225 ayat 2 UUK-PKPU)
- 2) Memberikan kewenangan untuk melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan kepemilikan atas seluruh atau sebagian harta debitur.
- 3) Bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta Debitur (pasal 234 ayat 4)

Jumlah pengurus bisa perseorangan atau bisa pula berbentuk dewan pengurus.¹¹ Bila berbentuk dewan pengurus, untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para pengurus memerlukan persetujuan lebih dari ½ (setengah) jumlah pengurus. Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya menurut pasal 236 ayat 2 UUK-PKPU, maka Hakim Pengawas yang akan menentukan.

¹¹ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, 108

Pengurus yang sudah diangkat dapat diganti dan ditambah jumlahnya oleh pengadilan atas persetujuan kreditur berdasarkan:

- 1) Usulan Hakim Pengawas
- 2) Permohonan kreditur berdasarkan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) para kreditur
- 3) Permohonan pengurus itu sendiri

f. Panitia Kreditur

Selain pengangkatan Hakim pengawas dan pengurus, Pengadilan menurut pasal 231 ayat 1 UUK-PKPU harus pula mengangkat panitia kreditur yang merupakan wakil atau mewakili kepentingan hukum para krediturnya. Pengangkatan Panitia Kreditur apabila:

- 1) Permohonan PKPU meliputi utang yang bersifat rumit atau banyak krediturnya, atau
- 2) Pengangkatan tersebut dikehendaki oleh kreditur yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh tagihan diakui..

Tugas panitia pada dasarnya hanya memberikan rekomendasi yang diperlukan pengurus dalam menjalankan tugasnya, baik berupa nasihat, saran, usul, maupun masukan.¹² Tidak ada kriteria khusus dalam pemilihan panitia kreditur, akan tetapi kita dapat mengetahui dari pasal 231 ayat 1 huruf b bahwasannya dalam pengangkatan panitia kreditur siapapun itu orangnya harus disetujui sedikitnya satu perdua dari kreditur.

¹²*Ibid.*, 112.

g. Advokat

Dalam kepailitan dan PKPU advokat memegang peranan yang sangat sentral sebab Permohonan Pailit dan PKPU tidak dapat diajukan sendiri oleh kreditur maupun debitur melainkan harus melalui kuasanya yakni advokat (pasal 224 ayat 1 UUK-PKPU). Ketentuan tersebut tidak berlaku manakala pihak pemohon adalah Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, dan Menteri Keuangan. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 UUK-PKPU. Dalam UUK-PKPU Tidak ada kriteria khusus yang menjadi dasar dalam pemilihan advokat yang menangani proses PKPU.

h. Kurator

Menurut pasal 70 ayat 1 UUK-PKPU Adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang. Yang dapat menjadi Kurator adalah:

- 1) orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yaitu mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan Kurator dan pengurus, yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan
- 2) terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan terdaftar adalah telah memenuhi

syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif organisasi profesi Kurator dan pengurus

i. Tenaga Ahli

Dalam penjelasan UUK-PKPU Ahli adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang yang akan diperiksa yang dalam hal ini adalah PKPU. Apabila PKPU dikabulkan hakim pengawas dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta debitur dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya. Laporan tersebut memuat pendapat yang disertai dengan alasan lengkap tentang keadaan harta debitur dan dokumen yang telah diserahkan oleh debitur serta tingkat kesanggupan atau kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur, dan laporan tersebut harus sedapat mungkin menunjukkan tindakan yang harus diambil untuk dapat memenuhi tuntutan kreditur (Pasal 238 UUK-PKPU).

4. Syarat-Syarat dan Prosedur Permohonan PKPU

Secara khusus UUK-PKPU menentukan tata cara (prosedur) yang harus ditempuh untuk mengajukan Permohonan PKPU. Permohonan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuat rencana perdamaian dengan para krediturnya. Menurut Munir Fuady Pihak yang berinisiatif untuk mengajukan permohonan PKPU pada umumnya adalah pihak debitur, yakni debitur yang sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya,

permohonan PKPU juga dapat datang dari krediturnya baik itu kreditur separatis, kreditur preferen maupun kreditur konkuren melalui kuasa hukumnya yang telah memperhitungkan bahwa debitur sudah tidak akan dapat membayar utang-utangnya tersebut.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, para pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah kreditur, debitur, Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut (OJK) yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menggantikan kewenangan dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Dalam hal ini OJK bertindak sebagai kreditur/pemohon PKPU. Perbedaan pihak yang mengajukan permohonan PKPU otomatis akan berbeda pula prosedur yang harus dilalui dalam pengajuan permohonan PKPU hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam UUK-PKPU sebagai berikut:

a. Kreditur

Dalam pasal 222 ayat 3 UUK-PKPU dijelaskan kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Krediturnya.

Permohonan harus diajukan kepada Pengadilan disertai tandatangan pemohon dan advokatnya. Permohonan PKPU tersebut diajukan kepada

pengadilan niaga meliputi tempat kedudukan hukum debitur, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.¹³ Terhadap permohonan tersebut selanjutnya Panitera daftarkan pada tanggal permohonan diajukan, dan pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan PKPU bagi institusi jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan.

Apabila sudah memenuhi syarat panitera menyampaikan permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan dan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan PKPU didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang (pasal 6 UUK-PKPU). Pengadilan wajib memanggil debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang. Dalam sidang debitur mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitur beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.

Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk hakim pengawas dari hakim pengadilan serta

¹³Pasal 224 ayat 1 Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang.

mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta Debitur (pasal 225 ayat 3 UUK-PKPU)

b. Debitur

Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Permohonan PKPU diajukan kepada Pengadilan meliputi tempat kedudukan hukum debitur dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya. Permohonan PKPU tersebut harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitur beserta surat bukti secukupnya juga dapat dilampirkan rencana perdamaian (pasal 224 UUK-PKPU)

Selanjutnya Panitera mendaftarkan permohonan PKPU pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan PKPU bagi institusi jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan (pasal 6 UUK-PKPU). Apabila sudah memenuhi syarat panitera menyampaikan permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan dan dalam jangka waktu paling

lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan PKPU didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.

Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan surat harus mengabulkan PKPU sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitur mengurus harta debitur. Segera setelah putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara diucapkan, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditur untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.

Apabila debitur tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir dan Pengadilan wajib menyatakan Debitur Pailit dalam sidang yang sama.

c. Otoritas Jasa Keuangan

Dalam pasal 223 dijelaskan apabila Debitur adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan

permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagai berikut:

- 1) Dalam hal Debitur adalah bank, permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- 2) Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- 3) Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Akan tetapi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terjadi peralihan kewenangan yang dimana dari Menteri keuangan dan BAPEPAM-LK ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga keuangan lainnya. Dengan begitu maka untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap lembaga diatas dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan(OJK).hal ini berlaku juga terhadap fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK (Pasal 55 UU No. 21 tahun 2001 tentang OJK).

Dalam UUK-PKPU Prosedur dalam pengajuan PKPU oleh lembaga sebagaimana diatas tidak dijelaskan secara khusus, tetapi karena lembaga tersebut diatas berperan sebagai kreditur/pemohon maka prosedur permohonan PKPU sama dengan kreditur bentuk firma dan perseroan.

Menurut Fred B.G Tumbuan, Pengadilan niaga tidak berwenang menolak permohonan penundaan tersebut dan juga tidak boleh menilai kelayakan permohonan dimaksud. Walaupun demikian, Pengadilan Niaga dapat menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk varklaren*).¹⁴ Putusan PKPU bersifat *final dan binding*, yaitu tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang, akan tetapi Upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum (pasal 293 UUK-PKPU).

Segera setelah putusan PKPU sementara diucapkan, Pengadilan melalui Pengurus wajib mengumumkan putusan PKPU Sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Manfaat Apabila permohonan PKPU dikabulkan dari sisi ekonomi adalah, Debitur dapat melanjutkan usahanya, tidak terjadi pemutusan hubungan kerja, tidak terganggunya rantai usaha dan akan berakibat kreditur akan dibayar seluruh utang-utangnya.

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 424

Alur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang



5. Jenis-Jenis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dalam pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), terdapat dua macam putusan yang dijatuhkannya atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bagi debitur yaitu:

a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara.

Sebelum Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengadakan pemberian PKPU tetap, baik debitur dan kreditur dapat mengajukan untuk diberikan Putusan PKPU sementara. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 225 ayat 2 dan 3 UUK-PKPU. Merupakan kepentingan semua pihak agar pengadilan secepatnya memberikan PKPU sementara agar segera terjadi keadaan diam (*stay* atau *standstill*) sehingga kesepakatan yang dicapai antara debitur dan para krediturnya tentang rencana perdamaian betul-betul efektif.

Dalam PKPU sementara ditentukan batas waktu bagi pengadilan untuk mengabulkan PKPU sementara, yaitu tiga hari sejak tanggal

didaftarkannya surat permohonan tersebut. Itu berarti, sepanjang debitur telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pengadilan dengan sendirinya harus memberikan PKPU sementara. Sedangkan apabila permohonan datang dari kreditur maka, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.

Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, Berdasarkan pasal 225 ayat UUK-PKPU Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditur lewat surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 terhitung sejak putusan PKPU. Selanjutnya pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus.

Penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berlaku sejak tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) diselenggarakan. Pada hari sidang

rapat permusyawaratan yang telah ditentukan, pengadilan niaga harus memeriksa debitur, hakim pengawas dan para kreditur yang hadir atau wakilnya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa. setiap kreditur berhak untuk hadir walaupun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu. Ketentuan ini dibuat untuk berjaga-jaga menghindari keributan dalam hal surat undangan tidak sampai diketahui oleh kreditur tertentu.

Dalam sidang ini bila diminta oleh pengurus, hakim pengawas dapat mendengarkan pula saksi atau pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut PKPU.¹⁵ Saksi-saksi tersebut wajib mengangkat sumpah atau memberikan keterangan di muka sidang pengadilan niaga. Istri atau suami, bekas istri atau suami, dan keluarga sedarah menurut keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari Debitur dapat menggunakan hak mereka untuk dibebaskan dari kewajiban memberi kesaksian.

Permohonan PKPU yang telah ditetapkan sebagai PKPU sementara, Pengadilan Niaga memberikan kesempatan kepada debitur dan kreditur untuk verifikasi atas utang-utang debitur, membicarakan dan mengupayakan tercapainya perdamaian sesuai proposal rencana perdamaian debitur yang diajukan kepada kreditur dalam pengawasan Hakim Pengawas. hal sesuai dengan ketentuan Pasal 224 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa: "Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitur

¹⁵Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, 106

mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitur beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.

Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementaratelah disampaikan oleh Debitur sebelum sidang maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan, jika ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 telah dipenuhi yakni:

1) Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera, Hakim

Pengawas harus menentukan:

- a) hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus;
- b) tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Kreditur yang dipimpin oleh Hakim Pengawas.

2) Tenggang waktu antara hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling singkat 14 (empat belas) hari.

Selanjutnya pemungutan suara mengenai rencana perdamaian tersebut dapat dilakukan. Dalam hal ketentuan diatas belum dipenuhi atau jika para kreditur belum memberikan suara mengenai rencana perdamaian. Maka atas permintaan debitur, para kreditur harus menentukan pemberian atau penolakan PKPU tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitur, pengurus dan para kreditur untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya. Berdasarkan pemngutan suara

inilah pengadilan akan dapat memutuskan secara definitif (tetap) terhadap permohonan PKPU.¹⁶

Pada hari ke 46 (empat puluh enam) setelah putusan permohonan PKPU Sementara diterima oleh Majelis Hakim, Hakim Pengawas hadir kembali dihadapan Majelis Hakim dalam sidang untuk mendengarkan laporan-laporan hasil rapat kreditur tersebut, pengurus juga hadir untuk memberikan laporan-laporan mengenai kondisi keuangan dan perusahaan debitur, sidang juga dihadiri oleh debitur dan kreditur untuk didengarkan keterangannya apakah sesuai dengan laporan-laporan yang diberikan oleh hakim pengawas dan pengurus tersebut.

b. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap

Apabila pada hari ke 45 atau rapat kreditur tersebut belum dapat memberikan suara mereka terhadap rencana perdamaian dan PKPU tetap disetujui oleh para kreditur, maka penundaan yang diputuskan oleh pengadilan niaga tidak boleh melebihi 270 hari terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan. Dalam waktu itu terhitung pula perpanjangan jangka waktu penundaan itu apabila hal itu diberikan oleh pengadilan niaga hal ini dimaksudkan agar terdapat kepastian mengenai jangka waktu PKPU. Yang berhak untuk menentukan diberikan tidaknya PKPU tetap adalah kreditur konkuren, sedangkan

pengadilan hanya berwenang menetapkan berdasarkan persetujuan kreditur konkuren.¹⁷

Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:

- 1) persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
- 2) persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditur atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Tujuannya PKPU tetap adalah memungkinkan debitur, pengurus dan para kreditur untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian pada rapat atau sidang selanjutnya. Dalam jangka waktu PKPU tetap rencana perdamaian perlu dibicarakan dan diputuskan oleh para kreditur.

Apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir, karena Kreditur tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu belum tercapai

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 432

persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan Debitur Pailit paling lambat pada hari berikutnya. Atas pernyataan pailit Pengurus wajib mengumumkan dalam surat kabar harian di mana permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diumumkan.

Sedangkan apabila rencana perdamaian di terima dan setuju oleh kreditur maka PKPU tetap berakhir pada saat putusan tentang pengesahan perdamaian itu memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sediki dua surat kabar harian. Terhadap permohonan PKPU tetap ditolak bagi debitur tidak disediakan untuk dapat melakukan kasasi, sebaliknya apabila PKPU tetap dikabulkan , kreditur tidak pula dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun (Pasal 235 ayat 1 UUK-PKPU)

6. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Setelah Penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan PKPU juga dapat diakhiri atas permintaan hakim pengawas, satu atau lebih kreditur, atau atas prakarsa Pengadilan apabila:

- a. Debitur, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;

- b. Debitur telah merugikan atau telah mencoba merugikan krediturnya;
- c. Debitur melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1);
- d. Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitur;
- e. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
- f. Keadaan Debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditur pada waktunya.

Dalam keadaan sebagaimana diatas pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran PKPU. Selanjutnya Pemohon, Debitur, dan pengurus harus didengar alasan permohonan pengakhiran PKPU dalam sidang pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan setelah dipanggil sebagaimana mestinya. Dalam hal pengakhiran PKPU debitur juga diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan yang demikian itu sekalipun dengan alasan yang berbeda bagi Hakim Pengawas.¹⁸

Permohonan tersebut harus diajukan oleh advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus. Permohonan pengakhiran PKPU harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pengajuan permohonan tersebut, dan putusan Pengadilan harus diucapkan dalam

¹⁸*Ibid.* 105

jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pemeriksaan. Dengan memuat alasan yang menjadi dasar putusan tersebut. Selanjutnya debitur harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama.

7. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Dengan ditetapkannya Penundaan kewajiban pembayaran utang secara otomatis akan berakibat hukum sebagai berikut:

- a. Terhadap debitur, dalam Pasal 240 ayat (1) dan ayat (3) yang mengatakan bahwa debitur tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya, kewajiban debitur yang dilakukan tanpa mendapat persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya Penundaan Kewajiban Pembayaran (PKPU) hanya dapat dibebankan kepada debitur sepanjang menguntungkan harta debitur. dalam hal ini usaha dari debitur masih tetap bisa berjalan demi meningkatkan nilai harta kekayaan debitur.

Debitur yang memiliki perkara yang telah diperiksa maka perkara itu tidak menghentikan atau mengalangi Penudaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan debitur juga tidak dapat menjadi penggugat maupun tergugat dalam perkara yang menyangkut hak dan kewajiban berkaitan dengan harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus (Pasal 243).

- b. Terhadap utang debitur, dalam Pasal 242 selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), debitur tidak dapat dipaksa membayar utangnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 245

dan semua tindakan eksekusi yang dimulai harus ditangguhkan kecuali telah ditetapkan diawal oleh Pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sita yang telah diletakkan gugur.

c. Terhadap Perjanjian Debitur

1) Perjanjian utang yang memuat klausula arbitrase

Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana psal 2 ayat 1 UUK-PKPU (pasal 303 UUK-PKPU)

2) Perjanjian kerja

Debitur memiliki hak untuk memutuskan hubungan kerja setelah dikabulkannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) diucapkan, akan tetapi harus memperoleh persetujuan pengurus dan memperhatikan jangka waktu menurut Undang- Undang, hubungan kerja diberitahukan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya. Gaji dan biaya lainnya karyawan menjadi utang harta debitur (pasal 252).

3) Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik yang belum atau yang akan dipenuhi . Dimana pihak tersebut dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disetujui pengurus

dan pihak tersebut. Jika pengurus menyatakan kesanggupannya maka pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Hal ini tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan Debitur melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan (Pasal 249 UUK-PKPU)

4) Perjanjian Penyerahan Barang yang diperdagangkan

Apabila sebelum dikabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terdapat perjanjian penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dalam jangka waktu tertentu, maka setelah dikabulkan berakibat pada hapusnya perjanjian tersebut dengan diberikan hak mendapat ganti rugi. Jika karena pengakhiran perjanjian itu harta debitur menderita maka pihak lawan wajib mengganti kerugian.

5) Perjanjian Sewa Menyewa

Pasal 251 UUK-PKPU mengatur mengenai perjanjian sewa menyewa, dalam perjanjian sewa menyewa yang dilakukan debitur sebelum dikabulkannya PKPU debitur dengan persetujuan pengurus dapat menghentikan perjanjian sewa dengan pemberitahuan penghentian tersebut dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian yang dimaksud. Namun perjanjian tidak dapat dihentikan apabila uang sewa telah dibayar di muka, maka sejak dikabulkannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) uang sewa yang telah dibayar di muka merupakan utang harta debitur.

d. Terhadap Usaha dari Debitur, debitur dapat melanjutkan usahanya, tidak terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar besaran, tidak terganggunya rantai usaha dan akan berakibat kreditur akan dibayar seluruh utang-utangnya.¹⁹

8. Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Pengertian perdamaian menurut Pasal 1851 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang. Suatu perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa harus memenuhi syarat-syarat formal dalam putusan perdamaian agar mempunyai kekuatan hukum tetap. Syarat-syarat tersebut yaitu: Persetujuan perdamaian mengakhiri perkara, Persetujuan berbentuk tertulis, Pihak yang membuat persetujuan perdamaian adalah orang yang mempunyai kekuasaan, dan Seluruh pihak yang terlibat dalam perkara ikut dalam persetujuan.

Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Bab III, Bagian Kedua, Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Pasal 265 UUK-PKPU menjelaskan bahwa setelah debitur mengajukan PKPU debitur berhak menawarkan suatu rencana perdamaian kepada kreditur. Berdasarkan mekanisme PKPU yang ditentukan oleh UUK-PKPU tidak

¹⁹ Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2012), 56

ada pihak-pihak lain selain debitur dan para kreditur yang berhak merundingkan dan menyepakati rencana perdamaian.

Rencana perdamaian dalam PKPU hanya dapat diajukan oleh debitur hal ini sebagaimana dijelaskan dalam dala 222 ayat 2 dan 3 UUK-PKPU. Sedangkan rencanaperdamaiaandalamrangkaPKPU dapat diajukan pada saat sebagai berikut:²⁰

- a. Bersamaan dengan diajukannya PKPU.
- b. Setelah permohonan PKPU diajukan, namun rencana itu harus diajukan sebelum tanggal hari sidang.
- c. Setelah tanggal sidang, yaitu selamaberlangsungnya PKPU sementara.

Rencana perdamaian yang diajukan harus disusun sedemikian rupa oleh debitur sehingga para krediturnya akan bersedia menerima rencana perdamaian itu. Hanya rencana perdamaian yang dinilai oleh para kreditur layak dan menguntungkan bagi para kreditur yang akan diterima para kreditur.²¹ dalam hal ini debitur dapat membentuk suatu tim konsultan ahli terdiri dari kantor Akuntan Publik, kantor Konsultan Hukum, kantor konsultan Manajemen Keuangan Bisnis dan Perusahaan penilai yang diperlukan keahliannya untuk menyusun rencana perdamaian yang memenuhi syarat kelayakan khususnya apabila menyangkut jumlah utang yang besar agar nantinya rencana perdamaian ini diterima dan menguntungkan debitur dan kreditur.²²

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undnag No. 37 Tahun 2004 tentan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 453-454

²¹ *Ibid.*, 457

²² 459

Kesepakatan antara debitur dengan para krediturnya menganalisis rencana perdamaian terdiri dari beberapa bentuk restrukturisasi yakni: moratorium penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo, *Haircut*, yakni pemotongan atau pengurangan pokok pinjaman dan bunga, Pengurangan tingkat suku bunga, Perpanjangan jangka waktu pelunasan, Konversi utang menjadi saham (*convert debt equity*), *Debt forgiveness* (pembebasan utang), Bailout, yakni pengambil alihan utang-utang, contohnya pengambil alihan utang-utang swasta oleh pemerintah, dan *Write off*, yakni penghapusan buku utang-utang.²³

Rencana perdamaian dimaksudkan untuk mengajukan kerangka perdamaian berbentuk proposal yang meliputi tawaran –tawaran tentang pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Proposal rencana perdamaian ini ditujukan untuk menjadi perjanjian baru sebagai pembaharuan terhadap perjanjian utang piutang yang dibuat sebelumnya oleh debitur dan kreditur, hal tersebut dikarenakan debitur diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya kepada kreditur sesuai yang dengan perjanjian utang piutang yang mengikat debitur dan kreditur sebelumnya, maka dibutuhkan prosedural baru terhadap pembayaran utang-utang debitur yang dapat meyakinkan para kreditur untuk menerimanya.²⁴

²³ MunirFuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, 200

²⁴ Rindy Ayu Rahmadiyah, “Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur Oleh Kreditur Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Notarius*, Edisi 8, No. 2 (September, 2015). E-Journal Undip., 260

Proposal rencana perdamaian dibahas pada saat rapat kreditur yang dipimpin oleh hakim pengawas, yang dihadiri oleh debitur, kreditur dan juga pengurus. Rapat kreditur diadakan pada masa PKPU Sementara berlangsung yaitu dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan permohonan PKPU diterima oleh Majelis Hakim. Proposal rencana perdamaian dapat ditolak atau diterima oleh para kreditur, hal tersebut dipengaruhi oleh bagaimana cara debitur dapat meyakinkan para kreditur bahwa debitur masih layak untuk diberikan kesempatan dalam melunasi utang-utangnya sesuai dengan yang tercantum dalam proposal rencana perdamaian. Apabila tidak juga terjadi kesepakatan antara debitur dan kreditur tentang perdamaian, maka hakim pengawas melakukan *voting* untuk menyampaikan hak suara, selain menerima proposal rencana perdamaian, para kreditur juga dapat menolak proposal rencana perdamaian tersebut apabila tidak yakin dengan isi dan tawaran yang diajukan oleh debitur.²⁵

Apabila rencana perdamaian diterima para kreditur, maka tidak segera dilaksanakan. Ada tahap lain yang mesti ditempuh, yaitu memperoleh pengesahan perdamaian dari pengadilan niaga, dalam hal ini Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian, dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta Kreditur dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau

²⁵*Ibid.*, 260

penolakan perdamaian. Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang.²⁶

B. Tinjauan Umum Homologasi

1. Pengesahan Perdamaian (Homologasi) dan Akibat Hukumnya

Rencana perdamaian yang sudah disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah kreditur yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui serta mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang kreditur konkuren yang diakui dalam rapat. Selanjutnya disahkan (diratifikasi) oleh pengadilan Niaga melalui putusan pengesahan perjanjian perdamaian (homologasi). Tanpa memperoleh pengesahan perdamaian dari pengadilan niaga, maka rencana perdamaian tersebut tidak berlaku dan operasional secara hukum. Dalam hal ini Pengadilan Niaga tidak serta merta mengesahkan rencana perdamaian tersebut, pengadilan niaga diberi hak untuk menolaknya berdasarkan alasan-alasan tertentu apabila:

- a. Harta Debitur, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak

²⁶*Ibid.*, 469

jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau

- d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Ini berarti hakim pengadilan niaga tidak dimungkinkan untuk menolak pengesahan rencana perdamaian berdasarkan alasan lain atau karena jabatannya. Apabila rencana perdamaian diterima, maka hakim pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan pada tanggal tertentu yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian. Pada tanggal tersebut jua pengurus serta kreditur dapat menyampaikan alasan-alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan perdamaian. Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditur, kecuali Kreditur yang tidak menyetujui rencana perdamaian. Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian.

Perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh pengadilan maka perdamaian tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak, adapun akibat hukum dari suatu perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh Pengadilan terhadap para pihak yaitu:²⁷

²⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undnag No. 37 Tahun 2004 tentan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 476

Rencana perdamaian yang disepakati oleh debitur dan para kreditur baik dengan atau tanpa adanya perubahan dan setelah kesepakatan itu disahkan oleh pengadilan niaga maka perjanjian perdamaian tersebut mengikat baik debitur maupun semua kreditur. Selanjutnya hubungan antara debitur dengan semua krediturnya tidak lagi diatur dengan syarat dan ketentuan dari masing-masing perjanjian bilateral sebelumnya, berupa perjanjian utang-piutang, perjanjian menjadi tidak berlaku lagi setelah rencana perdamaian telah disepakati dan kemudian disahkan (homologasi) oleh pengadilan niaga. Kesepakatan dan pengesahan atas rencana perdamaian itu menimbulkan perjanjian baru.

Segala sengketa yang sedang diperiksa di muka pengadilan perdata yang timbul antara debitur dan para kreditur mengenai utang yang lama tidak lagi diselesaikan menurut syarat dan ketentuan perjanjian yang lama diantara mereka melainkan dengan ketentuan dan syarat perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga. Akibat hukum diatas juga berlaku kepada pemegang saham debitur yang berbentuk Perseroan Terbatas.²⁸

2. Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian

Jika dilihat dari substansi isi perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi, maka pada dasarnya perjanjian tersebut berisi kewajiban-kewajiban sepihak dari debiturnya. Pokok gilirannya debitur harus melaksanakan isi perjanjian manakala telah jatuh tempo. Pelaksanaan isi

²⁸*Ibid.*, 478

perdamaian mengakibatkan penyelesaian utang debitur terhadap krediturnya dan debitur terhindar dari putusan pailit.²⁹

Kegagalan melaksanakan isi perdamaian ataupun sampai batas waktu yang tidak terlaksana berakibat debitur dinyatakan pailit. Debitur harus melaksanakan perjanjian damai apabila ingin terhindar dari putusan pailit. Jika debitur gagal, para krediturnya akan mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian. Suatu perdamaian dapat dibatalakan, pembatalan perdamaian disebabkan pihak debitur lalai dalam melaksanakan isi perdamaian. Dalam hal ini Pengadilan Niaga mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah debitur masih diberi kesempatan untuk melaksanakan isi perdamaian dengan waktu satu bulan.³⁰

Jadi di dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian terdapat dua kemungkinan, pertama isi perjanjian terlaksana oleh debitur, kedua debitur gagal atau samapai batas waktu yang ditentukan tidak terlaksana dengan akibat debitur dinyatakan pailit dan berlakulah ketentuan-ketentuan kepailitan dan akibat hukumnya.³¹

C. Tinjauan Umum Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari kata Belanda yaitu *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu

²⁹ Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, 114.

³⁰ *Ibid.*, 114-115

³¹ *Ibid.*

sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Prancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran.³² Dalam bahasa Indonesia pailit diartikan bangkrut. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang Debitur tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditur³³

2. Tujuan Hukum Kepailitan

Tujuan dari hukum kepailitan antara lain:³⁴

- a. Melindungi para Kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa “semua harta kekayaan Debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan Debitur”, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap Debitur.
- b. Menjamin agar pemberian harta kekayaan Debitur di antara para kreditur sesuai dengan asas pari passu (membagi secara proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditur konkuren atau unsecured creditors berdasarkan pertimbangan besarnya

³² Victor Situmorang & Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)., 18

³³ MunirFuady, *HukumPailitdalamTeoridan Praktek*, 8.

³⁴ Sutan Remy Syahdeini, *Hukum Kepailitan MemahamiUndang-Undang No.37Tahun 2004 Tentang Kepailitan*., 29-31

tagihan masing-masing). Di dalam hukum Indonesia asas pari passu dijamin oleh Pasal 1132 KUHPerdara.

- c. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur.
- d. Setelah tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaan debitur selesai dilakukan oleh kurator dan ternyata masih terdapat utang-utang yang belum lunas, debitur tersebut masih tetap harus menyelesaikan utangnya.
- e. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- f. Memberikan kesempatan kepada debitur dan para krediturnya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang debitur.

3. Kepailitan Akibat Penolakan Pengesahan Perdamaian.

Pernyataan Pailit sebagai akibat dari penolakan pengesahan perdamaian juga tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi maupun Peninjauan Kembali sebagaimana dikatakan dalam Pasal 293 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, undang-undang tersebut menganut prinsip perdamaian tunggal. Prinsip perdamaian tunggal ini terefleksi dalam Pasal 289 yang

menyebutkan para pihak hanya sekali dapat mengajukan rencana perdamaian.

Apabila rencana perdamaian ditolak, tidak dapat lagi diajukan rencana perdamaian kedua. Sebab, setelah rencana perdamaian tersebut ditolak, hakim pengawas wajib segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengadilan Niaga dan debitur langsung dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Prinsip perdamaian tunggal juga tercermin dari ketentuan dalam Pasal 292. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa apabila telah ditolak perdamaian dalam proses PKPU dan kemudian debitur dinyatakan pailit, dalam proses kepailitan tersebut tidak boleh lagi debitur mengajukan rencana perdamaian dan karenanya harta pailit debitur langsung berada dalam keadaan insolvensi.³⁵

Akibat hukum para kreditur menolak rencana perdamaian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka terjadi perubahan proses hukum, yang sebelumnya ditempuh dengan jalan damai berdasarkan proses PKPU berubah menjadi menggunakan proses yang berlaku dalam ketentuan kepailitan. Putusan pernyataan pailit juga membawa akibat hukum terhadap debitur. Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo. Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu dilakukan, beserta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Akibat hukum lain bagi perseroan adalah bahwa debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata

³⁵Rindy Ayu Rahmadiyanti, "Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur Oleh Kreditur Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.. 263

untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan kedalam harta pailit.

Pembekuan hak perdata ini diberlakukan terhitung sejak saat putusan pailit diucapkan. Akibat hukum putusan pailit mempunyai konsekuensi terhadap harta pailit perseroan (debitur). Semua perikatan antara debitur yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit, tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali jika perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit Perseroan terbatas sebagai badan hukum yang mempunyai harta kekayaan terpisah dari kekayaan perseronya dapat dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

Adanya pernyataan pailit oleh pengadilan mengakibatkan badan hukum tersebut kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya, karena hak pengurusan harta kekayaan perseroan beralih kepada kuratornya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Seorang kurator diberikan tugas sesuai dengan kewenangan dalam pengurusan dan/atau pemberesan harta debitur pailit dibawah pengawasan seorang hakim pengawas. Secara teoritis dengan diangkatnya kurator sebagaimana dituangkan dalam putusan pernyataan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, mempunyai arti kurator tersebut secara yuridis mempunyai kewenangan untuk mengurus harta debitur pailit menggantikan kewenangan debitur selaku pemilik harta pailit.³⁶

³⁶*Ibid.* 264

BAB III

PUTUSAN HOMOLOGASINOMOR 09/PDT.SUS-PKPU/2017/PN NIAGA SMG ATAS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang yang selanjutnya disebut PN Semarang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (*voorst*) Mahkamah Agung yang berada di Propinsi Jawa Tengah.¹ Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “*in concreto*” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²

PN Semarang terletak di jalan Siliwangi No. 512 Semarang, merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah hukum lebih 371,52 Km yang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan di kota Semarang. Tugas pokok PN Semarang adalah mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan menyelenggarakan Administrasi Perkara dan

¹<http://www.pn-semarangkota.go.id/images/stories/2017/Rencana%20Strategis%202015-2019-.pdf>
diakses pada tanggal 4 September 2019

²<http://www.pn-tanahgrogot.go.id/pengertian-peradilan/layanan-informasi-publik/pengertian-peradilan>, diakses pada tanggal 4 september 2019

Administrasi Umum lainnya. dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, PN Semarang didukung oleh pegawai teknis dan non teknis. Yang dimaksud tenaga teknis disini adalah hakim dan tenaga kepaniteraan, sedangkan tenaga non teknis adalah pegawai kesekretariatan.

Dalam menjalankan operasionalnya PN Semarang memiliki Struktur organisasi yang didasarkan kepada peraturan Mahkamah Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Adapun struktur organisasi PN Semarang adalah sebagai berikut:³

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang



Berdasarkan Informasi yang didapat dari website resmi PN Semarang fungsi, kedudukan dan kewenangan organ-organ Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang adalah sebagai berikut:

³Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang, http://www.pn-semarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=53&lang=id, diakses 13 september 2019

1. Ketua Pengadilan

- a. Bertugas menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan.
- b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan.
- c. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas:
 - 1) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.
 - 2) Masalah-masalah yang timbul.
 - 3) Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.
 - 4) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.
- d. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
- e. Menetapkan panjar biaya perkara (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara).

2. Wakil Ketua Pengadilan

- a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Mewakili ketua bila berhalangan.
- c. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua.
- d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

3. Hakim

- a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya
- b. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

4. Panitera

- a. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan;
- b. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan.
- c. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak 45

ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

- d. Membuat salinan putusan
 - e. Menerima dan mengirimkan berkas perkara.
 - f. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.
5. Wakil Panitera
- a. Membantu Pemimpin Pengadilan dalam hal membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, serta pelaksanaan dan juga pengorganisasiannya
 - b. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik.
 - c. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.
 - d. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya.
6. Panitera Muda
- a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
 - b. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing. 46 g. Panitera Pengganti, bertugas: Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

7. Sekretaris

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan.

8. Wakil Sekretaris

Membantu tugas pokok Sekretaris.

9. Kepala sub Bagian Umum,

- a. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan;
- b. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara.

10. Kepala sub Bagian Keuangan

Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan.

11. Kepala sub Bagian Kepegawaian,

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang, Menangani keluar masuknya pegawai, pensiun pegawai, kenaikan pangkat pegawai, gaji pegawai, mutasi pegawai, tanda kehormatan, usulan/ promosi jabatan, dll

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut diatas PN Semarang mempunyai visi dan misi seagai berikut:

visi

“Mengutamakan Pelayanan Publik di Bidang Pelayanan Hukum dan Keadilan Yang Berintegritas dalam Rangka Menuju Akreditas” dan

misi

"Mengoptimalkan Pelayanan Publik di Bidang Penegakan Hukum dan Keadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang".⁴

Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan, Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan diatur dalam undang-undang.⁵ Pengaturan pengadilan khusus dalam batang tubuh Undang-Undang No 48 Tahun 2009 semakin memperjelas, mempertegas posisi, kedudukan dan legitemasi pengadilan khusus yang tidak disebutkan secara rinci dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebelumnya.

Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan. Pada PN Semarang terdapat beberapa pengadilan khusus, diantaranya: Pengadilan Niaga dan Pengadilan

⁴http://www.pn-semarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=49&lang=id diakses pada tanggal 4 september 2019

⁵ Pasal 1 Angka 8 UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Hubungan Industrial, Pengadilan Anak, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor), sehingga PN Semarang Termasuk Pengadilan Kelas 1 A khusus.⁶

Pengadilan Niaga didirikan pada tahun 1998 dimana pada awalnya Pengadilan Niaga terbatas hanya mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. Tetapi pada tahun 2001, terjadi perluasan yang mencakup kewenangan untuk mengadili perkara Hak Atas kekayaan Intelektual (HAKI), meliputi kewenangan memeriksa sengketa merek, paten, hak cipta, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Pengadilan Niaga pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 281 ayat (2) Undang-undang tentang Kepailitan (Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 4 Tahun 1998 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan. Serta untuk meningkatkan pemerataan dan mempermudah masyarakat baik secara perorangan atau badan usaha dalam menyelesaikan sengketa didalam perniagaan secara adil, cepat, terbuka dan efektif, Pemerintah melalui Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999 tentang pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang,

⁶http://www.pn-semarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=48&lang=id Diakses Pada Tanggal 3 September 2019

Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang, membentuk Pengadilan di beberapa tempat dan membagi dalam beberapa daerah hukum antara lain:⁷

- a. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya.
 - b. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh.
 - c. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Propinsi yang Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur.
 - d. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Selanjutnya menurut pasal 300 ayat 12 UUK-PKPU pembentukan Pengadilan Niaga akan dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan. Perluasan pengembangan Pengadilan Niaga dilihat dari eksistensinya yaitu sebagai Pengadilan yang memutus perkara-perkara Kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Perkara HAKI.

⁷Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999 tentang pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang

Pembentukan Pengadilan Niaga membawa beberapa pembaruan, sebagai contoh adanya standar waktu penyelesaian perkara dan diperkenalkannya hakim Ad Hoc. hakim Ad-Hoc adalah seseorang yang bukan hakim Pengadilan Negeri, namun memiliki keahlian dalam menangani perkara niaga dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk ditugaskan di Pengadilan. Ketua Pengadilan Niaga dapat menunjuk hakim Ad-Hoc untuk menjadi anggota majelis dalam menangani perkara. Pengacara dari pihak dalam perkara niaga juga dapat meminta Ketua Pengadilan Niaga untuk memasukkan hakim Ad-Hoc ke dalam Majelis Hakim.

Pengadilan Niaga juga merupakan Pengadilan pertama yang memberikan kewenangan bagi hakimnya untuk mengajukan pendapat yang berbeda atau *dissenting opinion* dalam putusan. Dan karena Pengadilan Niaga merupakan bagian dari Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan serta Panitera Pengadilan juga bertindak sebagai Ketua Pengadilan dan Panitera Pengadilan Niaga. Namun, hakim yang menangani perkara niaga merupakan Hakim Karir yang khusus ditunjuk atau ditugaskan untuk itu. 5 dari 20 hakim karir di Pengadilan Negeri Semarang telah ditunjuk khusus oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Pengadilan Niaga Semarang pada tahun 2007. Untuk dapat ditunjuk sebagai hakim niaga, seseorang harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan khusus. Selain menangani perkara niaga, hakim niaga juga tetap menangani perkara-perkara umum (pidana dan perdata) yang masuk ke Pengadilan Negeri Semarang.

Dalam hal perkara Kepailitan dan PKPU Pengadilan memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim. Dalam

menjalankan tugasnya hakim Pengadilan Niaga dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti dan juru sita. Nantinya apabila perkara lain telah telah dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga menurut ketentuan Pasal 301 ayat 2 UUK-PKPU Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal (Bukan dengan Majelis Hakim).⁸

Setiap pengadilan khusus ini memiliki kompetensi absolute dan relatif untuk mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang yang membentuknya. Wilayah hukum atau domisili hukum Pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Domisili Hukum adalah hal krusial yang penting untuk menentukan sukses tidanya PKPU.⁹ Kompetensi absolut dalam perkara Kepailitan dan PKPU dapat kita ketahui dari beberapa ketentuan sebagai berikut: pasal 1 ayat 7 UUK-PKPU yang menyatakan Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum, Pengadilan Niaga yang dimaksud selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan kepailitan dan PKPU berwenang pula dan memutus perkara lain dibidang periagaan yang penetapannya diatur oleh Undang-Undang (Pasal 300 Ayat 1 UUK-PKPU). Putusan atas permohonan Kepailitan dan PKPU diputus oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitur.

⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 251

⁹ Nien Rafles Siregar, Seminar Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Prespektif Kurator dan Pengurus, 5 Juli 2019

Sedangkan terkait dengan kompetensi relatif dalam hal domisili hukum dijelaskan dalam Pasal 3 UUK-PKPU sebagai berikut: Dalam hal Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitor. Dalam hal Debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan. Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

B. Kronologi Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg

1. Para Pihak

Dalam Perkara Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg, terdapat beberapa pihak yang ikut terlibat didalamnya antara lain:

a. Pihak Pemohon dan Termohon PKPU

Para Pihak yang berperkara dalam perkara Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg, adalah PT. Industri Gula Nusantara yang selanjutnya disebut PT IGN yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Barat KM-6 Cepiring Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. dalam

perkara ini PT IGN bertindak sebagai pihak termohon PKPU dan atau debitur dengan kuasa hukumnya yakni saudara Antonius Susmono selaku karyawan di bagian HRD & Geberl Bagian Hukum, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ir. Slamet Poerwadi selaku Direktur Utama PT. Industri Gula Nusantara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017. Dengan pemohon PKPU yakni Christ Setiawan selaku Direktur Utama PT. Mitra Setia Jaya yang selanjutnya disebut PT. MSJ yang beralamat di Jl. Gajah No.28, Kav. Ruko B 9 Semarang, bertindak sebagai Pemohon PKPU. Dalam perkara ini memberikan kuasanya kepada Advokat dan Pengacara "Saksono Yudiantoro, SH.MH & Associates beralamat di Jl. Batan Selatan No. 20 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2017.¹⁰

Menurut Penjelasan dalam naskah permohonan, pemohon PKPU adalah suatu Perseroan Terbatas yang menjalin hubungan dagang dengan Termohon PKPU suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang Industri Gula dan Pemohon PKPU adalah supplier batu bara yang dibutuhkan sebagai bahan bakar oleh Termohon PKPU dan hubungan dagang ini sudah berjalan sekitar 3 tahun. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan PKPU apabila permohonan datang dari kreditur adalah debitur harus memiliki dua kreditur atau lebih selain kreditur yang mengajukan permohonan PKPU, dan dalam rangka memenuhi syarat tersebut pemohon mensertakan beberapa

¹⁰Naskah Putusan Homologasi Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg

kreditur dari PT IGN yang juga memiliki piutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kreditur tersebut antara lain:¹¹

- 1) PT. Garuda Mas Transindo, dengan jumlah piutang kepada PT. Industri Gula Nusantara, sebesar Rp. 9.720.000.000,-- (Sembilan milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah), sebagai tagihan pembayaran yang timbul akibat kontrak pembelian barang berupa molasses (tetes tebu) yang sudah dibayar tetapi tidak ada barangnya ;
 - 2) PT. Mitra Setia Jaya, dengan jumlah piutang kepada PT. Industri Gula Nusantara, sebesar Rp. 5.397.055.950,-- (Lima milyar tigaratus Sembilan puluh tujuh juta lima puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah)
 - 3) PT. Nusantara Travel, Semarang, dengan jumlah piutang kepada PT. Industri Gula Nusantara, sebesar Rp. 67.426.000,-- (enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah), sebagai tagihan pembayaran tang harga tiket pesawat yang dipesan dan telah digunakan tetapi pembayarannya belum dilaksanakan)
- b. Majelis Hakim

Sebagaimana dijelsakan dalam isi putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara ini terdiri dari: Edy Suwanto, SH, MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Pudjo Hunggul HW, SH, MH dan Wismonoto SH, sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor 09Pid.Sus .PKPU / 2017

¹¹ Naskah Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap PT Industri Gula Nusantara, 7 September 2017, 4

/PN.Niaga Smg tanggal 16 September 2017. Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Hakim dibantu oleh Afdlori, SH sebagai Panitera Pengganti. Selanjutnya dalam putusannya Majelis Hakim menunjuk Dewa Ketut Kartana,SH.MH.dari Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Semarang sebagai Hakim Pengawas dalam proses PKPU.¹²

c. Pengurus

Setelah hakim memutus mengabulkan Permohonan PEMOHON PKPU pemohon dan termohon PKPU berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dengan segala akibat hukumnya. Untuk membantu Hakim Pengawas bersama-sama dengan debitur dan mengurus harta debitur selama masa PKPU sementara, Majelis Hakim lewat putusan tersebut juga menunjuk dan mengangkat pengurus yaitu: Kairul Anwar, SH.MH. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor : AHU-75 AH.04.03-2017 tanggal 2 Juni 2017, dan Budi Utomo, S.H, M.H, M.M Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor : AHU-114AH.04.03-2017 tanggal 16 Juni 2017.

Menurut penilaian Majelis Hakim, Pengurus yang dimohonkan tersebut tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Pemohon dan Termohon PKPU, independen dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara. Pengurus dalam proses

¹² Naskah Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara Nomor 09/PDT.SUS-PKPU/2017/PN NIAGA SMG, 21

PKPU sementara ini termasuk kedalam pengurus perseorangan dengan pertimbangan dari Majelis hakim dalam jumlah tagihan atas hutangnya Kreditur kepada Debitur.¹³

2. Isi Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg

Dalam naskah putusan PKPU Sementara dapat diketahui bahwasannya kronologi timbulnya permasalahan berawal dari tidak dipenuhinya kewajiban termohon yang seharusnya membayar sisa invoice atau dokumen yang digunakan sebagai pernyataan penagihan yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli dimana invoice tersebut berisi tentang perincian item yang dibeli, harga satuan dan total harga, serta tanggal pembeliannya dari pembelian barang yang sudah diterima oleh termohon berupa batu bara dari pemohon, sehingga dengan begitu termohon mempunyai utang yang telah tempo dan dapat di tagih karena dari awal perjanjian yang tertera dalam *purchase order* tempo pembayaran satu bulan setelah barang diterima, invoice yang belum dibayar oleh pihak Termohon PKPU adalah sebesar Rp. 4.151.581.500,- (empat milyar seratus lima puluh satu juta limaratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).¹⁴

Sebelum pemohon mengajukan permohonan PKPU, Pemohon dengan itikad baik menagih utang tersebut baik lisan maupun tertulis tetapi

¹³ Naskah Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara Nomor 09/PDT.SUS-PKPU/2017/PN NIAGA SMG, 20

¹⁴ Hasil wawancara dengan Agus Suhartoyo, Anggota Tim Kuasa Hukum Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tanggal 10 september 2019

tidak mendapatkan tanggapan yang semestinya dari Termohon, sebagaimana surat-surat somasi / teguran berikut ini:¹⁵

- a. Surat No. 12/Adv/SY/XI/2016, tanggal 18 November 2016, Tentang : Pemberitahuan.
- b. Surat No. 05/Adv/SY/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016, Tentang : Somasi / Tegoran.
- c. Surat No. 09/Adv/SY/XII/2016, tanggal 23 Desember 2016, Tentang : Somasi / Tegoran Ke2.
- d. Surat No. 05/Adv/SY/V/2017, tanggal 17 Mei 2017, Tentang : Somasi.

Terakhir dengan Somasi tertanggal 29 Nopember 2016 No. 14/Adv/SY/XI/2016 tetapi termohon tetap tidak melakukan pelunasan pembayaran utangnya kepada Pemohon PKPU dan hingga saat diajukannya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini, Termohon PKPU masih tidak/belum membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Selanjutnya antara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU beserta dua kreditor lain pernah mengadakan pertemuan untuk mengupayakan perdamaian dan pada tanggal 19 April 2017, bertempat di Kantor Termohon PKPU telah dicapai suatu kesepakatan antara PT. Industri Gula Nusantara sebagai debitordengan 3 (tiga) Krediturnya.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Slamet Rijadi, Anggota tim Kuasa Hukum Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada tanggal 25 September 2019

Kesepakatan tersebut tertuang dalam kesepakatan penyelesaian tagihan piutang PT. Garuda Mas Transindo, PT. Mitra Setia Jaya, PT. Nusantara Tour, yang dibuat pada tanggal : 19 April 2017 dan dilegalisir oleh MAKIN AMIN, SH Notaris di Kendal, dimana telah disepakati akan dibayar oleh PT. Industri Gula Nusantara secara tunai dan sekaligus dalam jumlah sebagaimana tertera diatas dalam waktu 15 hari kerja terhitung sejak tanggal kesepakatan ini dibuat.

Akan tetapi itikad baik dari pemohon dan kreditur lainnya dengan beberapa kali memperingatkan/teguran agar Termohon PKPU memenuhi kewajiban pembayaran utangnya gagal, terbukti hingga batas waktu yang ditentukan dan sampai permohonan PKPU diajukan, Termohon PKPU tidak dapat memenuhi kewajiban membayar utangnya, yang meliputi pokok, bunga dan denda. Berdasarkan hal-hal diatas PT. MSJ melalui Pengacara "Saksono Yudiantoro, SH.MH & Associates mengajukan Permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga Semarang yang daerah hukumnya meliputi wilayah hukum debitur. Dalam permohonan tersebut pemohon berharap agar majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:¹⁶

- a. Mengabulkan Permohonan penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU /PT. Industri Gula Nusantara, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Hukum Republik Indonesia,

¹⁶Naskah Permohonana Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap PT Industri Gula Nusantara, 7 September 2017, 6

berkedudukan di Kendal, Jawa Tengah Jl. Soekarno Hatta Barat KM-6 Cepiring ;

- b. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara terhadap Termohon PKPU / PT. Industri gula Nusantara, untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan.
- c. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/ PT. Industri Gula Nusantara.
- d. Mengangkat 4 pengurus PKPU antara lain: Sdr. M. DIPA YUSTIA PASA, SH. M.Kn. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-66, tanggal 18 Mei 2015, Sdr. DHONI PRAWASTO, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor: AHU-122 AH.04. 03-2017 tanggal 22 Juni 2017, Sdr. KAIRUL ANWAR, S.H.M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor : AHU-75 AH.04.03-2017 tanggal 2 Juni 2017, Sdr. BUDI UTOMO, S.H, M.H, M.M Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia,

Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor : AHU-114AH.04.03-2017 tanggal 16 Juni 2017. Selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU / PT Industri Gula Nusantara.

- e. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Kreditor lainnya yang dikenal, dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang akan diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara ini diucapkan ;
- f. Menetapkan bahwa imbalan jasa tim pengurus akan ditentukan kemudian setelah selesainya Tim Pengurus menjalankan tugas;
- g. Menangguhkan untuk menetapkan biaya perkara a quo sampai selesainya proses PKPU a quo.

Atas permohonanPKPU Nomor Perkara 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg Pengadilan Niaga Semarang menentukan hari sidang dan memanggil para pihak dalam sidang. Para pihak hadir melalui kuasa hukumnya yaitu Slamet Rijadi,SH dari kantor Advokat dan Pengacara "Saksono Yudiantoro, SH.MH & Associates berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2017. Sebagai kuasa dari pemohon PKPU Christ Setiawan selaku Direktur Utama PT. Mitra Setia Jaya salah satu kreditur. Sedangkan PT. Industri Gula Nusantara selaku debitur/termohon diwakilkan oleh Antonius Susmono, Karyawan di bagian

HRD & Geberl Bagian Hukum Nusantara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017.¹⁷

Pada permulaan sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dicapai oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka pemeriksaan atas perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat Permohonan PKPU. Termohon mengatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan maksud dan isi Permohonan PKPU, dan selanjutnya melalaui Kuasa Hukumnya pada tanggal 2 Oktober 2017 termohon telah mengajukan jawaban terhadap permohonn PKPU sebagai berikut:¹⁸

- a. Terkait Alasan Hukum:Termohon PKPU sepakat dengan dalil Pemohon PKPU.
- b. Terkait dengan kondisi Termohon PKPU mempunyai hutang terhadap Pemohon PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih : Termohon PKPU mengakui dalil Pemohon PKPU nomer 3,4,5.
- c. Terkait Perkiraan Pemohon PKPU bahwa Termohon PKPU tidak akan mampu membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih: Termohon PKPU menjelaskan sebagai berikut: Bahwa Pemohon PKPU telah memasok batu bara kepada Termohon PKPU sebagaimana, dinyatakan oleh Pemohon PKPU senilai Rp 4.641.581.500 (empat milyar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan telah dibayar oleh

¹⁷Naskah Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara Nomor 09/PDT.SUS-PKPU/2017/PN NIAGA SMG, 6

¹⁸Naskah Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara Nomor 09/PDT.SUS-PKPU/2017/PN NIAGA SMG, 7

Termohon sebesar Rp 490.000.000 (empat ratus sembilan puluh juta) sehingga terdapat kekurangan bayar sebesar Rp .4.151. 581.500 (empat milyar seratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), meskipun sudah jatuh tempo Termohon PKPU belum bisa, menyelesaikan utang karena pada saat itu terdapat mis management sehingga mengakibatkan berbagai kewajiban termohon PKPU kepada, pihak ketiga mengalami ketidak lancarannya. Bahwa atas utang tersebut, Termohon PKPU sudah pernah melakukan kesepakatan dengan Pemohon PKPU dan Kreditor lainnya pada, tanggal 19 April 2017 yang tertuang dalam Kesepakatan Penyelesaian Tagihan Piutang PT, Garuda Mas Transindo, PT. Mitre Setia Jaya, PT Nusantara, Tour dan dilegalisir oleh Notaris Makin Amin. SH, dengan jumlah Utang secara rinci sebagai berikut :

Utang Pokok = Rp 4.151.581.500.

Bungs : 30 bulan x 1% = Rp 1.245.474.450

Jumlah Utang =Rp 5.397.055.950

Sesuai dengan Kesepakatan utang tersebut seharusnya dibayar oleh Termohon PKPU pada tanggal 5 Mei 2017, namun demikian karena adanya investor baru yang akan menjadi pemegang saham PT. IGN maka pembayaran tersebut belum bisa dilaksanakan oleh Termohon PKPU. Terkait hal tersebut Termohon PKPU pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan No 006/DIRIGN/AGS/08/17 tentang akan masuknya investor baru pada tanggal 18 Agustus 2017 sebagai bukti bahwa, sebenarnya kegiatan usaha Termohon PKPU

masih berjalan bahkan diperkirakan masuknya dana segar yang akan digunakan untuk menyelesaikan semua kewajiban Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU dan kreditur lainnya.

Termohon PKPU sebenarnya sedang berusaha dengan sungguh sungguh untuk memenuhi semua tagihan para kreditur, namun demikian saat ini sedang ada investor baru yang akan menjadi pemegang saham baru PT. IGN, sehingga dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran utang tersebut memerlukan waktu dan proses. Apalagi saat ini masih dilakukan *due dilligence* dalam rangka masuknya investor baru. Dengan harapan sebelum berakhimya PUKPU Sementara, tersedia dana dalam bentuk Cek atau BG dari investor baru yang bisa diserahkan termohon kepada pemohon dan kreditur lainnya sebagai bentuk itikad baik dari Termohon untuk memenuhi kewajiban Termohon karena Permohonan PKPU ini juga sudah diketahui dan dipahami oleh calon investor baru.

- d. Terkait bahwa Termohon PKPU mempunyai lebih dari satu kreditor: Termohon PKPU membenarkan hal ini.
- e. Terkait Permohonan PKPU oleh Pemohon PKPU layak dikabulkan: Termohon PKPU tidak mengingkari bahwa secara normatif mengacu Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang, terhadap kondisi Termohon PKPU, maka Permohonan Pemohon PKPU dapat dikabulkan. Akan tetapi dengan pertimbangan bahwa tujuan terjalinnya kemitraan usaha antara pemohon pkpu dengan termohon pkpu adalah untuk mendapatkan

kemanfaatan bersama, maka dengan mempertimbangkan usaha yang bersungguh sungguh yang telah dan sedang dilakukan oleh Termohon PKPU dalam menarik investor bare guns segera dapat memenuhi kewajibannya terhadap Pemohon PKPU dan para kreditur lainnya, maka pengajuan Permohonan PKPU oleh Pemohon PKPU tidak tepat, karena justru akan menghambat upaya masuknya investor bare. Yang itu berarti upaya menuju penyelesaian hutang Termohon PKPU menjadi semakin sulit.

- f. Terkait dengan pengangkatan Hakim Pengawas dan Pengurus: apabila Permohonan PKPU ini dikabulkan oleh Hakim yang mulia, termohon PKPU rela hati dengan pengangkatan Hakim pengawas dan Pengurus karena ini amanat UUK-PKPU, akan tetapi khususnya terkait dengan pengurus, menurut hemat Termohon PKPU, jumlah pengurus cukup satu saja atau jika sangat diperlukan maksimal dua orang. Hal ini mengacu pada cakupan tugas utama pengurus adalah bagaimana menghantarkan agar antara debitur dengan para krediturnya dapat tercapai suatu kesepakatan atas rencana perdamaian Sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU

Sebagaimana uraian di atas, termohon PKPU selanjutnya memohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: Menolak Permohonan Penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU / PT. Industri Gula Nusantara,

suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Kendal, Jawa Tengah Ji. Soekamo Hatta Barat KM-6 Cepiring, secara keseluruhan.

Pada hari Rabu tanggal .4 Oktober Majelis Hakim yang terdiri dari, Edy Suwanto. SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Pudjo Hunggul HW, SH.MH. dan Wismonoto. SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor 09Pid.Sus. PKPU /2017/PN.Niaga Smg tanggal 16 September 2017 mengadili:¹⁹

- a. Mengabulkan Permohonan pemohon PKPU untuk seluruhnya dan
- b. PT IGN berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dengan segala akibat hukumnya.
- c. Menunjuk Sdr Dewa Ketut Kartana,SH.MH.dari Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Semarang sebagai Hakim Pengawas dalam proses PKPU perkara *a quo*.
- d. Menunjuk dan mengangkat: 1, Sdr. Kairul Anwar, S.H.M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor : AHU-75 AH.04.03-2017 tanggal 2 Juni 2017; 2. Sdr. Budi Utomo, S.H, M.H, M.M Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor : AHU-114AH.04.03-2017 tanggal 16 Juni 2017. Selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan

¹⁹Naskah Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara Nomor 09/PDT.SUS-PKPU/2017/PN NIAGA SMG,19-22

kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU / PT Industri Gula Nusantara ;

- e. Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) ini akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017, pukul 09.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Jalan Siliwangi Nomor 512, Krapyak, Semarang.
- f. Memerintahkan kepada para Pengurus untuk memanggil Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Para Kreditor dengan surat tercatat atau melalui kurir agar datang pada hari sidang yang ditetapkan.
- g. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi para Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir .
- h. Menghukum pihak Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp.3.411.000, (tiga Juta empat ratus sebelas ribu rupiah) Putusan tersebut diatas tertuang dalam naskah putusan PKPU sementara Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg.

Selanjutnya menindak lanjuti dari putusan PKPU sementara diatas, dan setelah Majelis hakim melihat fakta-fakta hukum dalam proses PKPU sementara, maka dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pengadilan niaga pada hari senin tanggal 18 desember 2017 memutuskan, menyatakan sah kesepakatan dan perdamaian PT IGN dengan para krediturnya.

Menghukum debitur dan para krediturnya untuk mentaati perjanjian perdamaian yang telah disahkan.²⁰

3. Pertimbangan Hakim

Dalam proses pengambilan keputusan majelis tunduk kepada ketentuan hukum acara yang berlaku dan yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah tuntutan dari pemohon telah memenuhi persyaratan pemberian PKPU kepada termohon. Dan atas hal tersebut Majelis Hakim mengeluarkan beberapa pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim dalam perkara ini majelis hakim dapatkan dari fakta hukum dipersidangan dan penerapan hukum yang berlaku, yang selanjutnya majelis hakim rumuskan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:²¹

Pertimbangan hukum terkait persyaratan formal sebagaimana ditentukan dalam UUK-PKPU yang secara garis besar sudah terpenuhi mulai dari:

- a. Permohonan yang diajukan Pemohon PKPU telah ditandatangani oleh Pemohon PKPU dan Kuasa Hukumnya. dengan demikian ketentuan pasal 224 ayat 1 UUK-PKPU sudah terpenuhi.
- b. Termohon PKPU terbukti mempunyai lebih dari satu Kreditor, meliputi pemohon PKPU dan masing masing ketiga krediturnya yang juga mempunyai piutang yang telah jatuh tempo kepada debitur, dengan demikian adanya lebih dari 1 (satu) kreditor telah terpenuhi.

²⁰Naskah Putusan Homologasi Perkara Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg

²¹Naskah Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara Nomor 09/PDT.SUS-PKPU/2017/PN NIAGA SMG, 18

Dengan demikian Permohonan PKPU dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3)UK-PKPU, sehingga berdasarkan Pasal 225 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, PKPU Sementara beralasan hukum untuk dikabulkan, paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan PKPU Sementara ini ditetapkan

- c. Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon Termohon mempunyai utang kepada Pemohon yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih sejak bulan Mei 1 2017
- d. Permohonan terhadap tim Pengurus yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim tidak sependapat karena menganggap permohonan tersebut sangat berlebihan bila dibandingkan dengan jumlah utangnya kreditur kepada debitur. maka setelah Majelis mempertimbangkan bahwa untuk tim pengurus adalah cukup 2 orang yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Pemohon dan Termohon PKPU, independen dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan PKPU lebih dari 3 perkara.
- e. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sesuai pasal 225 ayat 4 jo pasal 227 jo pasal 228 ayat 1 UUK-PKPU memberikan PKPUS untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari semenjak dijatuhkan putusan ini dan selanjutnya agar pengurus memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap sidang pada hari Kamis TANGGAL 17 Nopember 2017 pukul 10.00 Wib diruang sidang Pengadilan Niaga

pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai rapat permusyawaratan Hakim untuk mendengar Debitor, Hakim Pengawas, Pengurus dan Kreditor yang hadir.

Sedangkan pertimbangan hakim dalam putusan homologasi berdasar kepada beberapa laporan dari hakim pengawas dan tim pengurus juga ketentuan Pasal 281 ayat 1 dan 2, pasal 284 ayat 1, pasal 286, pasal 288 UUK-PKPU dan selajutnya hakim rumuskan pertimbangan tersebut sebagai berikut:

- 1) Dalam proses PKPU sementara Debitor telah mengajukan rencana perdamaian kepada para krediturya dan mendapatkan persetujuan dari krediturnya melalui pemungutan suara dengan hasil 70% para krediturnya mendukung untuk perdamaian dan status rencana perdamaian berubah menjadi perjanjian perdamaian. perjanjian perdamaian tersebut telah ditandatangani oleh debitor dan kreditor dihadapan hakim pengawas dan tim pengurus.
- 2) Karena ternyata tidak terdapat alasan yang kuat untuk menyatakan menolak mengesahkan akta perjanjian perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 285 ayat 2 UUK-PKPU maka dengan berpedoman ketentuan pasal 285 ayat 1 UUK-PKPU pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian. dengan adanya putusan tersebut maka mutatis mutandis PKPU menjadi berakhir.

C. Mekanisme Penyelesaian Utang Piutang dalam Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg

Setelah Perjanjian disahkan dalam putusan Homologasi PT IGN harus menyelesaikan semua utang kepada para krediturnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian perdamaian, apabila kreditur mengingkari perjanjian tersebut maka para kreditur akan mengajukan pembatalan homologasi ke Pengadilan Niaga Semarang yang berakibat kreditur dinyatakan pailit dan masuk kedalam perkara Kepailitan.²²

Perjanjian perdamaian itu sendiri yang mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:²³

- a. Proposal perdamaian ini adalah bentuk konkrit tanggapan dan tanggung jawab PT IGN atas permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Mitra Setia Jaya dan seluruh kreditur yang mengajukan tagihan uatangnya.
- b. Memberikan gambaran yang jelas kepada kreditur tentang kondisi perusahaan saat ini, termasuk menggambarkan asset dan kewajiban PT IGN. Sebagai pedoman dan pelaksana rencana perdamaian dan jadwal pembayaran kepada para kreditur sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.
- c. Bahwa proposal perdamaian ini ntuk dimintakan persetujuan kepada para kreditur dalam sidang homologasi perkara Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg.

²² Hasil wawancara dengan Agus Suhartoyo, Anggota Tim Kuasa Hukum Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tanggal 10 september 2019

²³ Putusan Homologasi Perkara Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg

Dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga Semarang terdapat mekanisme penyelesaian utang piutang yang ditawarkan oleh debitur, dan tawaran mekanisme tersebut diterima oleh 70% para kreditur sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan hakim diatas. Adapun mekanisme penyelesaian utang piutang sebagaimana dijelaskan putusan homologasi adalah sebagai berikut:²⁴

Pembayaran utang sepenuhnya hanya kepada Kreditur preferen dan kreditur konkuren, karena tidak ada tagihan utang kepada kreditur separatis. Pelunasan utang kepada kreditur preferen yaitu karyawan PT IGN sejumlah 317 karyawan dengan total utang Rp. 5.076.233.224. (Lima miliar tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh empat). Pelunasan utang kepada kreditur konkuren mekanisme pelunasannya dibagi menjadi 3 kelompok yang pembayarannya dicicil dimulai pada bulan April 2018.²⁵

1. Jumlah utang dibawah Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta) dengan jumlah total Rp. 641.767.109.00 (enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah) dan akan dibayar seluruhnya pada tanggal 1 April 2018, yang meliputi:

Tabel 3.1

Rincian Pembayaran Utang

| No. | Nama Kreditur | Jumlah Pembayaran |
|-----|-----------------|-------------------|
| 1. | Sutrasa Pratama | Rp. 4.356.000.00 |

²⁴Draf Rencana Perdamaian perkara Perkara Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg

²⁵ *Ibid.*

| | | |
|----|--------------------------|--------------------|
| 2. | Setono Rubber Tahnik | Rp. 17.700.000.00 |
| 3. | Selekta Kencana | Rp. 20.495.000.00 |
| 4. | PT Puji Lestari Purnama | Rp. 59.664.000.00 |
| 5. | Nosatovel (tiket/trevel) | Rp. 67.426.000.00 |
| 6. | CV EM Power | Rp. 85.179.160.00 |
| 7. | Yuhri | Rp. 119.600.000.00 |
| 8. | CV. Naora Sejati | Rp. 121.009.000.00 |
| 9. | CV. Sidqi Adiyatma | Rp. 146.337.500.00 |

2. Jumlah utang dibawah Rp. 15.000.000.000.00 (Lima belas miliar rupiah) dengan jumlah total Rp. 61.929.820.937,00 (enam puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) akan dicicil sebanyak 4 kali pembayaran dalam kurun waktu 8 bulan. Dengan jadwal sebagai berikut:

- 1) Pembayaran sebanyak 25% dari total kreditur konkuran tahap 1 atau sebanyak Rp. 19.286.797.000,00 akan dibayarkan pada tanggal 1 April 2018.

Tabel 3.2

Rincian Pembayaran Utang

| No. | Nama Kreditur | Jumlah Pembayaran |
|-----|----------------------------|---------------------|
| 1 | Yuniar Elok Sempurna | Rp. 92. 383.500.00 |
| 2 | Pancamanungal Wiradinamika | Rp. 110.020.625.00 |
| 3 | Dipo Joyo Asoclate | Rp. 247. 488.045.00 |

| | | |
|----|----------------------------|----------------------|
| 4 | PTPN IX | Rp. 397.219.91800 |
| 5 | Sumber Abadi Energindo | Rp. 879.463.500.00 |
| 6 | BPJS Ketenagakerjaan | Rp. 432.997.714.00 |
| 7 | Pangan Abadi | Rp. 1.150.000.000.00 |
| 8 | Mentari Agung Jaya Usaha | Rp. 1.260.063.300.00 |
| 9 | PT Mitra Setia Jaya | Rp. 1.349.263.988.00 |
| 10 | Garuda Mas Trasindo | Rp. 2.430.000.000.00 |
| 11 | Wijayatama Langeng Perkasa | Rp. 2.537.551.360.00 |
| 12 | Sederhana Makmur Utama | Rp. 2.823.145.454.00 |
| 13 | Teka Karya Barutama | Rp. 232.920.038.00 |
| 14 | Bhanda Ghara Reksa | Rp. 143.831.089.00 |
| 15 | Golden Pratama Gemilang | Rp. 124.215.245.00 |

- 2) Pembayaran sebanyak 30% dari total kreditur konkuren atau sebanyak Rp. 17.657.235.961.00 akan dibayarkan pada tanggal 1 Juni 2018.

Tabel 3.3

Rincian Pembayaran Utang

| No. | Nama Kreditur | Jumlah Pembayaran |
|-----|--------------------------------|--------------------|
| 1 | Yuniar Elok Sempurna | Rp. 110.860.200.00 |
| 2 | Pancamanunggal Wiradinamika | Rp. 132.024.750.00 |
| 3 | Dipo Joyo Associate | Rp. 296.985.654.00 |

| | | |
|----|----------------------------|-----------------------|
| 4 | PTPN IX | Rp. 476.663.901.00 |
| 5 | Sumber Abadi Energindo | Rp. 1.055.356.200.00 |
| 6 | BPJS Ketenagakerjaan | Rp. 564.779.627.00 |
| 7 | Pangan Abadi | Rp. 1.380.000.000.00 |
| 8 | Mentari Agung Jaya Usaha | Rp. 1.512.075.960.00 |
| 9 | PT Mintra Setia Jya | Rp. 1.619.116.75.00 |
| 10 | Garuda Mas Transindo | Rp. 2.916.000.000.00 |
| 11 | Wijayatama Langeng Perkasa | Rp.3.309.849.600.00 |
| 12 | Sederhana Makmur Utama | Rp. 3. 682.363.636.00 |
| 13 | Teka Karya Barutama | Rp. 279.504.046.00 |
| 14 | Bhanda Ghara Reksa | Rp. 172.497.307.00 |
| 15 | Golden Pratama Gemilang | Rp. 149.058.294.00 |

- 3) Pembayaran sebanyak 30% dari total kreditur konkuren atau sebanyak Rp. 17.657.235.961.00 dengan nama kreditur dan jumlah pemabayaran yang sama dengan sebagaimana djelaskan padatable diatas akan dibayarkan pada tanggal 1 Agustus 2018
- 4) Pembayaran sebanyak 15% dari total kreditur konkuren atau sebanyak Rp. 9.332.417.505,00 akan dibayarkan pada tanggal 1 Oktober 2018

Tabel 3.4

Rincian Pembayaran Utang

| No. | Nama Kreditur | Jumlah Pembayaran |
|-----|-----------------------------|----------------------|
| 1 | Yuniar Elok Sempurna | Rp. 55.430.100.00 |
| 2 | Pancamanunggal Wiradinamika | Rp. 66.012.375.00 |
| 3 | Dipo Joyo Asociate | Rp. 148.492.827.00 |
| 4 | PTPN IX | Rp. 238.331.951.00 |
| 5 | Sumber Abadi Energindo | Rp. 527.678.100.00 |
| 6 | BPJS Ketenagakerjaan | Rp. 320.041.789.00 |
| 7 | Pangan Abadi | Rp. 690.000.000.00 |
| 8 | Mentari Agung Jaya Usaha | Rp. 756.037.980.00 |
| 9 | PT Mintra Setia Jya | Rp. 809.558.393.00 |
| 10 | Garuda Mas Transindo | Rp. 1.458.000.000.00 |
| 11 | Wijayatama Langeng Perkasa | Rp. 1.875.581.440.00 |
| 12 | Sederhana Makmur Utama | Rp. 2.086.672.727.00 |
| 13 | Teka Karya Barutama | Rp. 139.752.023.00 |
| 14 | Bhanda Ghara Reksa | Rp. 86.298.654.00 |
| 15 | Golden Pratama Gemilang | Rp. 74.529.147,00 |

3. Jumlah utang diatas 15.000.000.000.00 (Lima belas miliar rupiah) dengan jumlah total 76.709.334.899.00 (tujuh puluh enam miliar tujuh ratus sembilan tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan

puluh sembilan) akan dibayar seluruhnya tanggal 1 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5

Rincian Pembayaran Utang

| No. | Nama Kreditur | Jumlah Pembayaran |
|-----|--------------------|-----------------------|
| 1 | Arbeska Mitra Jaya | Rp. 18.191.656.635.00 |
| 2 | Tetap Jaya | Rp. 58.517.678.264.00 |

Jika ditotal semua utang yang harus di lunasi kepada para kreditur adalah sebesar Rp. 141.184.788.434.00 (seratus empat puluh satu miliar dua ratus tiga puluh empat rupiah), tagihan utang tersebut berdasarkan hasil pendaftaran tagihan para kreditur kepada pengurus PKPU dan sesuai dengan rapat verifikasi piutang kreditur pada tanggal 3 november 2017.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HOMOLOGASI NOMOR 09/PDT.SUS- PKPU/2017/PN NIAGA SMG ATAS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

A. Analisis Proses Penyelesaian Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hingga Putusan Homologasi

Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU merupakan salah satu perkara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Niaga sebagai kompetensi absolutnya. Hal ini dijelaskan pada Pasal 280 ayat 2 UUK-PKPU yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga selain berwenang memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.¹ Dalam hal persoalan yang telah dibahas sebelumnya PT IGN berdomisili di Kabupaten Kendal Oleh karena itu maka Pengadilan Niaga yang berwenang menangani perkara ini adalah Pengadilan Niaga Semarang, yang mempunyai wilayah hukum meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan persidangan di Pengadilan Niaga Semarang sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun ketentuan tentang hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Niaga telah ditentukan dalam Pasal 229 UUK-PKPU yang menyebut kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku

¹Pasal 280 ayat 2, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

adalah hukum acara perdata. Hukum acara perdata yang dimaksud oleh pasal tersebut adalah hukum acara yang berdasarkan pada:²

- a. Reglemen Indonesia yang diperbarui (*het herzine indonesisch Reglemen, Statsblad* 1926: 559 *juncto* *Staatsblad* 1941:44)
- b. Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buifengewesten, Staatsblad* 1927: 227)
- c. Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering S.1847-52 jo 1849-63*)
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlick Wetboek voor Indonesie, S 1847-23*)
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Peradilan Umum.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Prosedur hukum yang digunakan Pengadilan Niaga Semarang dalam menangani perkara ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, acuannya

² Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, *Hukum Acara Pengadilan Niaga Practical Guide to The Commercial Court*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2018)., 9

adalah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 299 UUK-PKPU. UUK-PKPU merupakan *lex specialis* dari ketentuan hukum acara perdata yang merupakan *lex generalis* hal ini sesuai dengan asas dalam perundang-undangan yakni asas *lex specialis derogat lex generalis* yang berarti aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan-aturan yang bersifat umum. Ini berarti ketentuan dari hukum acara perdata tidak berlaku apabila sudah ada ketentuan yang diatur dalam UUK-PKPU.

Sedangkan apabila ada aturan yang belum diatur UUK-PKPU maka ketentuan yang dipakai sesuai dengan Hukum acara perdata. Pada asas integrasi yang terkandung dalam UUK-PKPU juga menjelaskan bahwa sistem hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Keberlakuan Undang-Undang ini juga mengikuti asas *lex posterior derogat legi priori* yaitu peraturan yang sederajat terbaru akan melumpuhkan peraturan yang sederajat lama. Jadi peraturan yang lama tidak berlaku yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan digantikan dengan Undang-Undang terbaru yakni UUK-PKPU.

Terkait dengan prosedur beracara dalam pengadilan niaga penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa informan yang menangani perkara ini diperoleh data sebagai berikut: wawancara dengan Ketua Majelis Hakim Edy Suwanto SH.MH yang menangani perkara, menuturkan bahwa dalam menangani perkara PKPU hukum acara yang dipakai adalah hukum acara yang sudah ditentukan dalam UUK-PKPU. Adapun asas-asas dalam beracara digunakan pula asas-asas yang sudah dijelaskan dalam UUK-PKPU karena

yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang tersebut. Beliau juga menambahkan yang membedakan hukum acara perdata biasa dengan hukum acara PKPU adalah hukum acara PKPU terdapat jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan juga dalam acara PKPU tidak ada mediasi, replik dan duplik, ini berbeda dari perkara kepailitan yang masih ada replik dan duplik.³.

Menurut Panitera Pengganti Afdlori SH yang menangani perkara ini menyebutkan, Pengadilan Niaga Semarang menggunakan hukum acara PKPU yang sebenarnya proses beracaranya sama dengan perdata biasa, yang membedakan hanya dalam PKPU ada batasan waktu. Menurut Slamet Rijadi SH, kuasa hukum pemohon PKPU menjelaskan dalam perkara ini hukum acara yang dipakai sesuai UUK-PKPU akan tapi dalam persidangan asas-asas dalam hukum acara perdata seperti sidang terbuka untuk umum tetap diberlakukan⁴

Ketentuan dalam UUK-PKPU tidak menjelaskan asas-asas dalam beracara di persidangan. Hal ini membuat asas-asas dalam hukum acara perdata berlaku pada saat persidangan perkara PKPU. Asas-Asas hukum acara perdata mengatur tentang proses jalannya persidangan yang wajib dilaksanakan oleh hakim dalam persidangan di Pengadilan. Apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak berpedoman dan atau menyimpang dari asas-asas hukum yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

³ Hasil Wawancara dengan Edy Suwanto, Hakim Pengadilan Niaga Semarang, pada tanggal 25 september 2019

⁴ Hasil Wawancara dengan Slamet Rijadi, Kuasa Hukum Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pada tanggal 25 September 2019

maka keputusannya dapat berakibat cacat hukum dan batal demi hukum.⁵ Hakim yang memeriksa perkara ini sudah sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari.

1. Hakim Bersifat Pasif

Yang dimaksud dengan asas Hakim bersifat pasif adalah inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak atau permohonan sepenuhnya diserahkan kepada yang berkepentingan. Dalam perkara perkara Nomor 09/Pdt.Sus-Pkpu/2017/PN Niaga Majelis Hakim memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara, setelah permohonan diajukan dan diterima oleh Pengadilan Niaga Semarang. Tidak mungkin hakim bisa melaksanakan tugas pokoknya tanpa ada permohonan yang masuk, dengan demikian majelis hakim telah melaksanakan asas hakim bersifat menunggu. Akan tetapi Pada saat proses persidanganmajelis hakim bersifat aktif, hal ini dapat dilihat dari upaya majelis hakim menawarkan perdamaian kepada kedua belah pihak, membacakan isi permohonan, pertimbangan-pertimbangan Hakim, dan amar putusan.

2. Hakim menyatakan persidangan terbuka

Yang dimaksud dengan asas terbukanya persidangan adalah proses berjalannya persidangan harus terbuka untuk umum, yang berarti bahwa publik diperbolehkan hadir melihat serta mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Hakim dalam persidangan ini membuka persidangan dengan menyatakan persidangan terbuka dan dibuka untuk umum, dan juga pada saat mengucapkan putusan yang dalam hal ini

⁵ Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010)., 14

putusan PKPU dan putusan homologasi majelis hakim mengucapkannya pada persidangan terbuka untuk umum.⁶ Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. Putusan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengakibatkan batalnya putusan tersebut menurut hukum.

3. Hakim mendengarkan keterangan kedua belah pihak

Hakim dalam menangani suatu perkara harus mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak tentang kronologi perkara. Kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama pendapatnya. Dalam perkara ini tindakan hakim dalam memenuhi asas tersebut adalah, bahwa hakim selain membaca dalil-dalil permohonan pemohon hakim juga membaca jawaban dari termohon yang selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara.⁷

4. Putusan hakim disertai alasan

Semua putusan Pengadilan harus memuat alasan–alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili alasan-alasan tersebut harus berdasar kepada hukum positif dan dalil-dalil yang ada. Dalam mengadili dan memutus perkara ini majelis berdasar pada alasan–alasan yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dan selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam UUK-PKPU.

⁶Naskah Putusan Penundaan Keajiban Pembayar Uatng Sementra Nomor 09/PDT.SUS-PKPU/2017/PN NIAGA, 21

⁷Hasil wawancara dengan Edy Suwanto, Hakim Pengadilan Niaga Semarang, pada tanggal 25 september 2019

5. Hakim memberlakukan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan

Yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. kata cepat menunjuk pada jalannya peradilan mulai dari berita acara dipersidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya tidak berlarut-larut. Yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan biaya-biaya lain di luar kepentingan para pihak dalam perkara.

Proses beracara perkara PKPU telah sesuai dengan asas cepat, karena dalam perkara PKPU telah ditentukan jangka waktu yang sudah diatur dalam UUK-PKPU. Terkait asas sederhana, menurut Ketua majelis hakim dalam perkara ini pembuktian sudah dilakukan dengan sederhana melalui adanya bukti dua lebih kreditur, adanya utang jatuh tempo dan tidak mampu membayar. Apabila permohonan PKPU yang pembuktiannya susah beliau akan akan menolak permohonan tersebut.⁸

Terkait biaya ringan, Pengadilan Negeri Semarang melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor :W12.U1.2030/HPDT.04.01/XI/2008 tanggal 3 Nopember 2008 Uang Muka (Panjar) Biaya Perkara Perdata Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, menetapkan rincian biaya perkara Pengadilan niaga termasuk didalamnya perkara PKPU yang mencapai Rp. 5.000.000.00. dan membuat perkara Pengadilan niaga digoelongkan menjadi yang termahal

⁸ Hasil wawancara dengan Edy Suwanto, Hakim Pengadilan Niaga Semarang, pada tanggal 25 september 2019

dibanding dengan perkara perdata lain ditingkat pertama.⁹ Dalam perkara ini biaya yang wajib dikeluarkan oleh debitur karena terhukum sebesar Rp. 3.411.000.00 yang terdiri dari biaya perkara Rp. 2.000.000.000, materai Rp. 6.000.00, proses Rp. 50.000.00, Redaksi Putusan Rp. 5.000.00, Panggilan, Rp. 1.350.000.00

Tentu hal ini menjadi beban tersendiri kepada para pihak khususnya debitur karena selain harus membayar seluruh tanggungan utang kepada para kreditur juga harus membayar biaya perkara. Hal ini tak sejalan dengan asas biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam hukum acara perdata meliputi 3 tahap tindakan, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan, tahap pelaksanaan.¹⁰ Apabila melihat sebagaimana dijelaskan dalam Bab III, tiga tahap tindakan dalam Hukum acara perdata dengan tindakan beracara pada perkara ini dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Tahap Pendahuluan

Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Dimulai dengan pengajuan Permohonan PKPU. Anatomi permohonan PKPU pada umumnya sama dengan anatomi gugatan, anatomi Permohonan PKPU berdasarkan Pasal 222 UUK-PKPU dijelaskan dengan kerangka sebagai berikut, dan selanjutnya penulis analisis dengan permohonan nomor 09/Pdt.Sus-

⁹ Laporan Panjar Perkara Pengadilan <http://www.pn-semarangkota.go.id> diakses pada tanggal 22 september 2019

¹⁰ Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 7

Pkpu/2017/PN Niaga, dan bisa dilihat apakah sudah sesuai dengan yang ditentukan atau belum.

a. Ditujukan kepada Pengadilan niaga sesuai dengan kompetensi relatif dalam permohonan tersebut. Permohon diajukan kepada ketua Pengadilan niaga Semarang di Pengadilan Negeri Semarang Jl. Siiwangi No 512 Semarang.¹¹ mempunyai wilayah hukum meliputi Provinsi jawa tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan letak usaha dari debitur atau termohon di Kabupaten Kendal yang termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah.

b. Diberi tanggal

Permohonan di beri tanggal sesuai tanggal diajukannya permohonan yaitu tanggal 7 september 2017.

c. Ditandatangani oleh pemohon dan advokatya

Dalam surat permohonan dalam lembar terakhir terdapat tanda tangan dari pemohon christ setiawan dan kuasa hukumnya saksono yudiantoro, SH.MH, Agus Suhartoyo, SH, slamet Riyadi, SH.

d. Identitas para pihak

Identitas para pihak, pemohon PT Mitra Setia Jaya (PT MSJ) yang beralamat di Jl. Gajah No.28, Kav. Ruko B 9 Semarang dan Termohon PT Industri Gula Nusantara yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Barat KM-6 Cepiring Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.

¹¹ Perohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap PT. Industri Gula Nusantara (IGN).

e. *Fundamental Petendi atau posita* (dalil permohoanan PKPU)

Dalam permohoanan PKPU terdapat beberapa unsur-unsur yang wajib dimasukkan dalam permohonan yang akan diajukan. Unsur-unsur itu pun sudah terpenuhi mulai dari adanya minimal dua kreditur dan utang yang sudah jatuh tempo. Adanya alasan bahwa kreditur memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini dapat diketahui melalui itikad baik dari kreditur menagih utang tersebut baik lisan maupun tertulis tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang semestinya dari Termohon, sebagaimana surat-surat somasi /tegoran yang dijelaskan dalam Bab III

Adanya maksud dari kreditur untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya. Adalah dalam pernyataan saat wawancara kepada anggota tim kuasa pemohon bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan PKPU agar debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi penawaran pembayaran utang dan juga agar usaha dari debitur tidak mati dan dapat terus berjalan.¹²

f. *Petitum* (tuntutan) Permohoanan PKPU

¹²Hasil wawancara dengan Agus Suhartoyo, Anggota Tim Kuasa Hukum Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tanggal 10 september 2019

Tuntutan dalam Permohonan PKPU dengan Permohonan Kepailitan mempunyai beberapa perbedaan. Tuntutan dan permohonan PKPU antara lain:

1) Tuntutan agar debitur dinyatakan dalam keadaan PKPU sementara dalam permohonan ini hal tersebut dijelaskan dalam tuntutan poin ke dua yang berbunyi menetapkan PKPU sementara terhadap termohon PKPU/PT Industri Gula Nusantara untuk paling lama 45 hari terhitung sejak putusan diucapkan

2) Tuntutan agar ditunjuk Hakim pengawas yang akan mengawasi proses PKPU

Dijelaskan Bahwa sehubungan dengan permohonan PKPU a quo, maka Pemohon PKPU dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara a quo agar berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang

3) Tuntutan agar diangkat pengurus yang bersamama –sama dengan debitur melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian harta debitur sesuai dengan prosedur Undang-Undang mengangkat beberapa orang dibawah ini yaitu: Sdr. M. Dipa Yustia Pasa, S.H. M.Kn, Dhoni Prawasto, S.H, Kairul Anwar, S.H.M.H., Sdr. Budi Utomo, S.H, M.H, M.M Kurator dan Pengurus yang terdaftar di

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor PKPU nantinya.

2. Tahap Penentuan

Tahap penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai kepada putusannya, pada tahap ini pemeriksaan dilakukan di persidangan oleh majelis hakim. Dalam Pemeriksaan atas perkara ini majelis hakim pada permulaan sidang berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dicapai oleh kedua belah pihak yang berperkara. Selanjutnya pemeriksaan dilanjut dengan dibacakannya surat Permohonan PKPU yang tidak akan diubah oleh pemohon, termohon yang telah mengerti pokok permohonan dalam sidang selanjutnya mengajukan jawaban atas permohonan tersebut yang membenarkan bahwa Termohon mempunyai utang kepada Pemohon yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih

Atas dasar bukti bahwa termohon mempunyai utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dan perkiraan termohon tidak sanggup membayar utang terbukti maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon PKPU untuk seluruhnya dan PT IGN berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dengan segala akibat hukumnya.

3. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan diadakan pelaksanaan dalam putusan. Untuk melaksanakan putusan PKPU Hakim pengawas yang diangkat oleh Majelis mengeluarkan beberapa penetapan antara lain:¹³

- a. menetapkan hari tanggal dan tempat untuk rapat kreditur,
- b. menetapkan hari,tanggal dan temppat untuk rapat pencocokan tagihan pajak dan tagihan para kreditur
- c. menetapkan surat kabar yang digunakan tm pengurus dalam menentukan putusan PKPU Sementara

Penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim pengawas tersebut diatas berjalan lancar dan untuk menindak lanjuti terkait proposal perdamaian yang diajukan termohon maka pemohon dan termohon sepakat untuk mengajukan permohonan perpanjangan waktu PKPU sementara. Majelis Hakim melihat itikad baik dari kedua belah pihak melalui laporan Hakim pengawas dan tim pengurus mengabulkan permohonan perpanjangan waktu PKPU sementara. Dari masa perpanjangan tersebut telah terjadi kesepakatan antara termohon dan pemohon dan kreditur lain mengenai proposal perjanjian perdamaian. dan pada sidang yang telah ditentukan Majelis Hakim mengeluarkan putusan Homologasi atas perjanjian perdamaian.

Secara garis besar proses perkara Nomor 09/Pdt.Sus-Pkpu/2017/PN Niaga Smg dari pengajuan permohonan hingga pembacaan amar putusan homologasi sudah sesuai dengan prosedur beracara dalam hukum acara

¹³Penetapan perpanjangan masa PKPU sementara, perkara Nomor 09/Pdt.Sus-Pkpu/2017/PN Niaga Smg

perdata, serta sudah memenuhi beberapa asas yang menjadi dasar yang harus dilaksanakan oleh Hakim dalam mengadili suatu perkara di persidangan Pengadilan. Meskipun asas biaya ringan belum bisa terpenuhi dalam beracara dalam Pengadilan niaga. Akan tetapi, hal tersebut tidak berpengaruh kepada putusan yang dikeluarkan atau diputus oleh Majelis dalam persidangan tersebut.

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Homologasi Nomor 09/Pdt.Sus-Pkpu/2017/PN Niaga

Putusan akhir merupakan puncak dari persidangan atas permohonan PKPU pada tingkat pengadilan Niaga. Putusan tersebut bisa mengabulkan permohonan PKPU atau menolaknya. Dikabulkan tidaknya permohonan PKPU didasarkan pada pasal 222 UUK-PKPU. Pada prinsipnya, permohonan PKPU harus dikabulkan apabila syarat-syarat sebagaimana pasal 222 UUK-PKPU sudah terpenuhi. Syarat fundamental yang harus dipenuhi adalah mengenai adanya utang-piutang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta terpenuhinya unsur kreditur-debitur. Apabila dilihat dari ketentuan diatas, putusan hakim yang mengabulkan permohonan kreditur telah tepat karena unsur sebagaimana dijelaskan diatas telah dipenuhi oleh kreditur.

Apabila syarat dalam pasal 222 UUK-PKPU tidak terpenuhi, maka permohonan PKPU tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk dikabulkan dan sebaliknya, apabila syarat tersebut dapat terpenuhi permohonan PKPU harus dikabulkan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal 225 ayat 3 UUK-PKPU.

Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta debitor.¹⁴

Salah satu yang membedakan antara perkara kepailitan dan perkara PKPU adalah bahwa terhadap putusan PKPU tidak terbuka upaya hukum apapun.¹⁵ Setelah hakim mengeluarkan putusan mengabulkan permohonan PKPU, maka selanjutnya hakim harus menyelesaikan perkara tersebut sampai pada pelaksanaannya. Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan tersebut secara paksa. Permohonan PKPU yang telah diputus oleh Majelis Hakim mengakibatkan debitur berada dalam masa PKPU sementara, hal ini memberikan kesempatan kepada debitur dan para krediturnya untuk memverifikasi utang-utang debitor hingga mengupayakan kesepakatan perdamaian.

Dalam perkara ini majelis hakim memantau pelaksanaan putusan PKPU melalui laporan-laporan dari hakim pengawas dan pengurus yang ditunjuk dalam putusan. Pasal 239 ayat 1 UUK-PKPU mewajibkan pengurus untuk setiap tiga bulan sekali melaporkan keadaan harta debitur. laporan tersebut nantinya digunakan sebagai bahan dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusan homologasi bersama dengan alat bukti lain. Dalam praktik peradilan, pertimbangan hukum disebut *considerans*, yang mana

¹⁴ Pasal 225 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁵ Pasal 235 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

merupakan dasar dari suatu putusan hakim. Hakim dalam membuat pertimbangan hukum terhadap perkara yang ditanganinya harus memuat alasan-alasan hukum, yaitu pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar dalam memutus perkara.

Menurut ketentuan PKPU sementara dapat berakhir apabila kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya, serta apabila sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu 270 hari setelah utusan KPU sementara diucapkan belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian. Atas berakhirnya PKPU sementara tersebut debitur harus dinyatakan pailit.¹⁶ Pada perkara ini karena masa waktu PKPU tidak cukup waktu untuk membahas rencana perdamaian dengan lebih detail maka pengurus berkonsultasi dengan hakim pengawas mengajukan permohonan perpanjangan waktu selama 30 hari agar memungkinkan pengurus untuk menjembatani dan mencari solusi yang bisa diterima semua pihak.

Melalui penetapan normor 9/Pdt.susPKPU/2017/PN Smg mengabulkan permohonan pengurus untuk perpanjangan waktu PKPU selama 30 hari serta memerintahkan kepada tim pengurus untuk memanggil debitur dan para krediturnya untuk hadir dalam persidangan pada tanggal 18 Desember 2017 guna diminta keterangan perihal rencana perdamaian yang diusulkan debitur.¹⁷ Penetapan yang dikeluarkan telah tepat, karena permohonan perpanjangan PKPU pada perkara ini dikehendaki oleh para pihak maka Majelis Hakim, dan kemungkinan terwujudnya perdamaian dalam perkara ini cukup besar.

¹⁶ Pasal 230 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁷ Penetapan Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Smg

Dalam sidang sebagaimana dijelaskan diatas, majelis hakim meminta keterangan dari para pihak prihal rencana perdamaian, keterangan ini oleh majelis hakim dijadikan alat bukti. alat bukti dapat diartikan sebagai alat atau upaya yang bisa digunakan oleh para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka Pengadilan. Sedangkan jika dilihat dari segi Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara alat bukti dapat diartikan alat atau upaya yang bisa digunakan oleh hakim untuk membuat pertimbangan dalam memutus perkara karena menurut sistem dari HIR hakim hanya dapat mendasarkan putusannya atas alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Menurut pasal 1866 KUH Perdata dijelaskan bahwa alat bukti terdiri atas:

- a. bukti tulisan,
- b. bukti dengan saksi-saksi,
- c. persangkaan-persangkaan,
- d. pengakuan dan sumpah

Untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan hukum, maka diperlukan alat bukti. Pembuktian adalah salah satu sisi penting dari proses persidangan perkara PKPU, suatu permohonan PKPU dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh para pihak, baik yang bermaksud untuk memperkuat dililnya sendiri maupun untuk membantah dalil pihak lain. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1865 BW Jo., Pasl 163 HIR yang berbunyi, barang siapa yang mengatakan mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan

haknya itu, atau menambah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Majelis Hakim yang menangani perkara ini terlebih dahulu meneliti apakah hubungan hukum yang diperselisihkan kedua pihak dalam perkara ini berdasarkan dalil-dalil dan alat bukti yang mereka ajukan benar adanya apa tidak, untuk kemudian dapat menetapkan pihak manakah yang dianggap berhasil membuktikan kebenaran. Suatu persengketaan atau perkara tidak bisa diselesaikan tanpa adanya alat bukti, artinya kalau permohonan PKPU tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan diputus juga oleh Hakim tetapi dengan menolak permohonan PKPU karena tidak terbukti, karena Pembuktian pada prinsipnya tidak bisa lepas dari pertimbangan Hakim. Dan dalam memutus homologasi perkara ini hakim mendapatkan alat bukti berupa:

- a. Alat bukti tulisan yang meliputi: Naskah Rencana perdamaian dari debitur, Akta Perjanjian yang dibuat antara debitur dan para kreditur dan telah ditandatangani di hadapan hakim pengawas dan pengurus, surat minat investasi dari PT PAS,
- b. Alat bukti pengakuan yang meliputi pengakuan dari kreditur atas pemungutan suara dan pembentukan akta perdamaian saat sidang.¹⁸

Dalam memutus Homologasi Majelis Hakim sudah berpedoman kepada pasal-pasal dan Undang-Undang yang relevan dengan persoalan Homologasi, adapun Undang-Undang yang dipakai Majelis Hakim sebagai dasar dalam memutus homologasi adalah Undang-Undang No. 37 tahun 2004

¹⁸Hasil Wawancara dengan Edy Suwanto, Hakim Pengadilan Niaga Semarang, pada tanggal 25 september 2019

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. Terhadap peraturan yang relevan tersebut selanjutnya Majelis Hakim padukan dengan bantahan atau eksepsi yang dihubungkan dengan alat bukti yang ada.

Dalam hal diterimanya rencana perdamaian, pasal 281 ayat I UUK-PKPU menentukan dasar diterimanya rencana perdamaian sebagai berikut:¹⁹

- a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
- b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditur tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut

Debitur dalam perkara ini beritikad baik dengan mengajukan proposal perdamaian yang sangat *visible* untuk diterima oleh para krediturnya. Dan pada pembahasan proposal tersebut mayoritas kreditur menyetujui proposal perdamaian yang disampaikan debitur. Dan pada saat yang bersamaan tim pengurus melakukan proses pemungutan suara atas rencana perdamaian dimana hasil yang didapat atas pemungutan suara tersebut dengan perhitungan 70% kreditur telah menyetujui rencana perdamaian yang diajukan debitur serta telah terjadi perdamaian dengan membuat akta perjanjian. Sehingga syarat diterimanya rencana perdamaian sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat 1 UUK-PPU diatas telah terpenuhi. Meskipun terdapat beberapa kreditur yang memang dari awal sudah tidak

¹⁹Pasal 281 ayat I Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

setuju dengan perdamaian karena ada motif untuk mematikan usaha debitur dengan dipailitkan.²⁰

Sebaliknya dengan hal tersebut, dalam memutus homologasi Majelis Hakim dapat menolak apabila ada indikasi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 285 ayat 2 UUK-PKPU, Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:²¹

- a. Harta debitur, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau
- d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Dengan mendapatkan laporan-laporan dari Hakim pengawas dan pengurus, Hakim dapat melihat apakah perkara yang ditangani ini akan ditolak atau disahkan, dalam hal ini laporan dari Hakim pengawas dan pengurus sangat menuntukan isi dari putusan nantinya, sebab hanya pengurus dan hakim pengawaslah yang tahu lebih detail terkait kondisi dari debitur dalam pelunasan utang. Laporan tersebut nantinya dijadikan bahan pertimbangan hukum oleh Hakim dalam putusan. Apabila Majelis Hakim melalui rekomendasi dari hakim pengawas menilai perjanjian perdamaian tersebut belum terjamin, maka Majelis Hakim dapat menolak untuk

²⁰Hasil wawancara dengan Slamet Rijadi, Anggota tim Kuasa Hukum Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada tanggal 25 September 2019

²¹Pasal 285 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

mengesahkan perjanjian perdamaian tersebut. Meskipun kedua belah pihak sudah ada kesepakatan damai.

Dalam perkara ini Hakim Pengawas memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim untuk menerima dan dihomologasi perjanjian perdamaian ini. Dengan alasan proposal yang diajukan oleh debitur didalamnya termuat surat pernyataan masuknya investor baru yang mau melunasi hutangnya dengan para kreditur.²² Sehingga tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak pengesahan perdamaian sebagaimana dijelaskan dalam 285 ayat 2 UUK-PKPU diatas

Karena tidak ada alasan hakim untuk menolak pengesahan perjanjian perdamaian maka Majelis Hakim mengeluarkan pertimbangan hukum, menimbang oleh karena tidak terdapat alasan yang kuat untuk menyatakan menolak mengesahkan akta perjanjian perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 285 ayat 2 huruf a,b,c,d UUK-PKPU dengan berpedoman kepada pasal 285 ayat 1 UUK-PKPU yaitu Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (3). Atas pertimbangan hukum tersebut majelis mengeluarkan putusan, menyatakan sah kesepakatan dan perdamaian PT IGN/debitur dengan para krediturnya serta menghukum PT IGN dan para krediturnya untuk mentaati perjanjian perdamaian yang telah disahkan. Tindakan hakim dalam membuat pertimbangan hukum hingga mengeluarkan putusan Homologasi atas perjanjian perdamaian sudah tepat, karena selain

²²Hasil Wawancara dengan Edy Suwanto, Hakim Pengadilan Niaga Semarang, pada tanggal 25 september 2019

Majelis Hakim melihat alat bukti, majelis hakim juga tidak mengesampingkan rekomendasi dari Hakim pengawas dan Pengurus. Sehingga putusan hakim dalam perkara ini dapat diterima dengan baik oleh para pihak.

Putusan hakim dalam perkara ini apabila dilihat dari sudut pandang hukum islam juga telah sesuai sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”²³

Apabila ada orang yang memiliki utang dan sedang kesulitan untuk membayar utang-utangnya, berilah ia tengang waktu hingga sampai orang tersebut betul-betul mampu membayarnya. Pada dasarnya perkara PKPU merupakan upaya untuk memberikan kesempatan kepada debitur yang sedang kesulitan untuk membayar utang-utangnya kepada kreditur dan juga memberikan tenggang waktu yang telah disepakati antara debitur dan kreditur hingga debitur mampu melunasi utang-utangnya.

C. Analisis Mekanisme Eksekusi Penyelesaian Utang dalam Perjanjian Homologasi Nomor 09/Pdt.Sus-Pkpu/2017/PN Niaga

Proposal rencana perdamaian yang dibuat dan diajukan kepada kreditur apabila telah disetujui dan telah memenuhi persyaratan pada Pasal 281 UUK-PKPU harus diajukan permohonan pengesahan perdamaian, hal inibertujuan agar rencana perdamaian yang dilakukan oleh debitur dan para

²³ Yayasan Penyelenggara Penerjeah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fajd, 1971)., 70

krediturnya dapat memperoleh kekuatan hukum tetap, serta dapat dilaksanakan untuk mengakhiri status PKPU yang melekat pada debitur. Tanpa memperoleh pengesahan dari Pengadilan Niaga maka rencana perdamaian itu tidak berlaku secara hukum dan tidak dijamin oleh hukum. Sedangkan rencana perdamaian yang telah mendapat pengesahan homologasi dari Pengadilan Niaga memiliki akibat hukum yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh debitur, dan menjadi dasar untuk debitur melakukan perbuatan hukum.

Dalam agama Islam utang merupakan salah satu yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat nanti. Salah satu riwayat Nabi Muhammad SAW mengenai utang dijelaskan dalam hadits dari Shuhaib Al Khoir, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:²⁴

أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمَعٌ أَنْ لَا يُؤْقِيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا

“Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri.”

Hadist ini menghimbau kepada umat manusia untuk segera melunasi utang yang dimiliki dan jangan sekali-kali mengingkari utang terset, karena apabila dia mengingkari utang yang dimiliki nantinya bisa menjadi beban tersendiri pada hari kiamat dengan balasan mendapatkan status pencuri saat bertemu dengan Allah.

Penyelesaian utang dalam perkara ini berarti melaksanakan dan mentaati isi perjanjian yang telah disahkan. Dalam perkara ini perjanjian

²⁴HR. Ibnu Majah no. 2410. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan shohih*

perdamaian diterima dengan disetujui oleh 70 % kreditur, sedangkan kreditur tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dijelaskan dalam (Pasal 281 ayat 1 huruf UUK-PKPU). Yang dimaksud dengan nilai jaminan disini adalah nilai jaminan yang dapat dipilih diantara nilai jaminan yang telah ditentukan dalam dokumen jaminan atau nilai objek jaminan atau nilai objek jaminan yang ditentukan oleh penilai yang ditunjuk oleh hakim pengawas.

Terkait dengan cara penyelesaian utang dan kemampuan debitur dalam menyelesaikan utangnya kepada para kreditur. PT IGN selaku debitur dalam kurun waktu 2015 sampai putusan homologasi disahkan tahun 2017 beberapa kali diberitakan sedang mengalami kesulitan keuangan hingga terancam bangkrut oleh surat kabar semisal Radar pekalongan yang mengeluarkan berita ada tanggal 28 november 2017 dengan hideline “5 Bulan Belum Gaji Karyawan PT Industri Gula Nusantara Terancam Bangkrut” ini berarti berita terbit satu bulan setelah pemohon mengajukan permohonan PKPU.²⁵

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan kuasa dari pemohon yang menyebut sebelum pemohon perkara ini mengajukan permohonan PKPU sudah ada yang mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Negeri Semarang, yang membuat permohonan dari pemohon perkara ini harus

²⁵ 5 Bulan Belum Gaji Karyawan PT Industri Gula Nusantara Terancam Bangkrut, <https://radarpekalongan.co.id/5321/5-bulan-belum-gaji-karyawan-pt-ign-terancam-bangkrut/> diakses pada tanggal 29 september 2019

menunggu sampai perkara itu selesai. Dari sini dapat penulis simpulkan bahwasanya debitur sebelum permohonan ini diajukan sudah mengalami kesulitan keuangan didukung lagi beberapa kali berhenti produksi, yang ini membuat PT IGN tidak ada pemasukan untuk membayar gaji karyawan dan utang-utangnya kepada para kreditur.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa terhadap rencana perdamaian, Majelis Hakim hanya mengesahkan atau melakukan konfirmasi dari Hakim pengawas dan pengurus yang menilai dari hasil kesepakatan antara debitur dan para krediturnya. Didalam laporan hakim pengawas menyebut akan ada investor masuk hal itu lah yang membuat para kreditur setuju dengan rencana perdamaian yang selanjutnya disahkan oleh Majelis Hakim dalam putusan homologasi. Pada pasal 285 ayat 2 huruf UUK-PKPU menyatakan, pelaksanaan perdamaian harus terjamin dan terkait hal ini PT IGN hanya menjaminkan kepada surat minat investasi dan surat rencana investasi sebagaimana dijelaskan dalam rencana perdamaian. Kuasa Pemohon sendiri terkait jaminan tersebut masih meragukan dan meminta jaminan dalam bentuk lain yang lebih konkrit namun hal itu ditolak oleh debitur. Terkait bagaimana cara debitur memperoleh dana para kreditur tidak peduli, yang terpenting utang kepada pemohon dapat terlunasi.²⁶

Dalam rangka meyakinkan para kreditur kalau debitur mampu melunasi utang-utangnya, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 285 ayat 1 yakni termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh

²⁶Hasil wawancara dengan Slamet Rijadi, Anggota tim Kuasa Hukum Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada tanggal 25 September 2019

lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian. Kreditur dalam rencana perdamaian mencantumkan daftar aktivat tetap PT IGN pada bulan Oktober 2017 sebagai berikut:

| No | Asset | Nilai |
|-------|--------------------------|------------------------|
| 1 | Kendaraan dan Inventaris | Rp. 10.904.072.728.69 |
| 2 | Mesin dan Peralatan | Rp. 284.834,784.233.19 |
| 3 | Tanah dan Bangunan | Rp. 101.065.089.987.65 |
| Total | | Rp. 396.803.946.949.53 |

Sedangkan tagihan utang PT IGN berdasarkan hasil pendaftaran tagihan para kreditur kepada pengurus PKPU mencapai sebesar Rp. 141.284.788.434.00. tagihan utang tersebut hanya kepada kreditur kreditur preferen dan kreditur konkuran karena PT IGN sudah tidak ada lagi utang dengan kreditur separatis. Kreditur preferen yang dalam hal ini adalah Karyawan PT IGN yang jumlah 317 karyawan dengan kewajiban pembayaran sebesar Rp. 5.076.233.224. Dalam perjanjian kreditur preferen akan dibayar seluruhnya pada tanggal 1 April 2018. Setelah penyelesaian utang dengan kreditur preferen selesai, pada bulan yang sama debitur juga melunasi utang kepada kreditur konkuren dengan cara pembayarannya dicicil dan dibagi dalam 3 kelompok sesuai besaran piutang yang dimiliki sebagai berikut:

1. Kreditur Konkuren dengan Jumlah utang dibawah Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta) dengan jumlah total Rp. 641.767.109.00 (enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan) dan akan dibayar seluruhnya pada tanggal 1 april 2018. Tagihan tersebut masing-masing kepada sutrasa pratama, setono rubber tehnik, selekta kencana, PT Puji Lestari Purnama, Nusatovel, CV EM Power, YUHRI, Cv Naora Sejati, CV Sidqi Adiyatma
2. Kreditur Konkuren dengan Jumlah utang dibawah Rp. 15.000.000.000.00 (Lima belas miliar rupiah) dengan jumlah total Rp. 61.929.820.937,00 (enam puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) akan dicicil sebanyak 4 kali pembayaran dalam kurn waktu 8 bulan. Tagihan tersebut masing-msing kepada, Yuniar Elok Sempurna, Pancaanunggal Wiradinamika, Dipo Joyo Associate, PTPN IX, Sumber Abadi Energindo, BPJS ketenagakerjaan, Pangan Abadi, Mentari Agung Jaya Usaha/Yulisman, PT Mitra Setia Jaya, Garuda Mas Transindo/Bambang, Wijayatama, Langgeng Perkasa/Tikno, Sederhana Makmur Utama/Bp. Anen, Teka Karya Barutama, Bhanda Ghara Reksa, Golden Pratama Gemilang
3. Kreditur Konkuren dengan Jumlah utang diatas 15.000.000.000.00 (Lima belas miliar rupiah) dengan jumlah total 76.709.334.899.00 (tujuh puluh enam miliar tujuh ratus sembilan tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) akan dibayar seluruhnya tanggal 1

Desember 2018. Tagihan tersebut masing-masing kepada Arbesta Mitra Jaya dan Tetap Jaya

Terhadap utang dan daftar aktiva tetap tersebut diatas dapat diketahui pada prinsipnya PT IGN sangat prospektif dalam penyelesaian utang dan juga Pabrik PT IGN praktis siap beroperasi dengan dukungan dari calon investor yang bersedia menyuntik dana segar untuk kepentingan PT IGN. Serta tidak menutup kemungkinan PT IGN mampu merevitalisasi perusahaannya karena secara umum kondisi pabrik masih dalam keadaan baik. Adapun dalam hal penyelesaian utang saat ini penulis tidak mengetahui secara mendalam. Karena dari awal penulis tidak memiliki akses untuk wawancara dengan PT IGN selaku debitur, akan tetapi menurut informasi dari Kuasa hukum Pemohon pelunasan utang kepada para kreditur sudah selesai dilaksanakan oleh debitur. Oleh karena penyelesaian utang kepada kreditur yang telah dilaksanakan, maka dapat dikatakan sudah tidak berlaku lagi perjanjian perdamaian tersebut diatas, sebab yang menjadi permasalahan utama perkara ini adalah penyelesaian utang piutang oleh debitur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg yang pada akhirnya diputus homologasi, penulis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses permohonan PKPU nomor perkara 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg melibatkan Direktur PT. Mitra Setia Jaya selaku kreditur dari PT Industri Gula Nusantara selaku debitur, permohonan PKPU diajukan oleh kreditur karena kreditur mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan menganggap debitur tidak mampu lagi melunasi utang-utangnya. Hal ini dapat dibuktikan dari berulang kali kreditur mengirimkan surat peringatan dan surat somasi yang mana debitur tetap tidak melakukan pelunasan pembayaran utang kepada kreditur. Oleh karena itu berdasarkan pasal 222 ayat 1 UUK-PKPU kreditur mengajukan permohonan PKPU dengan tujuan memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengajukan rencana perdamaian. Selanjutnya karena permohonan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 ayat 3 UUK-PKPU maka permohonan PKPU dikabulkan oleh mejelis hakim. Atas dikabulkannya permohonan tersebut debitur berada dalam masa PKPU sementara, dan dalam masa PKPU sementara debitur mengajukan

proposal rencana perdamaian yang pada akhirnya disahkan menjadi perjanjian perdamaian oleh majelis hakim pada Putusan homologasi.

2. Pertimbangan hakim dalam putusan homologasi yaitu, karena ada rekomendasi dari hakim pengawas dan pengurus mengenai perjanjian antara debitur dan kreditur yang mana dalam perjanjian tersebut debitur menjanjikan mekanisme penyelesaian utang piutang dengan bantuan dana dari investor baru yang berkenan untuk melunasi utang-utang debitur. Selain itu aktiva dari debitur yang masih lebih besar dari jumlah keseluruhan utang debitur membuat tidak ada alasan lagi dari hakim untuk menolak mengesahkan perjanjian perdamaian tersebut dengan pertimbangan hukum sudah sesuai dengan dasar diterimanya rencana perdamaian yang sudah ditentukan dalam pasal 281 ayat 1 UUK-PKPU dan juga tidak ada dasar untuk menolak mengesahkan perjanjian perdamaian sebagaimana dijelaskan dalam pasal 285 ayat 2 UUK-PKPU
3. Mekanisme Penyelesaian Utang piutang dalam perkara ini dilakukan dengan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi, pembayaran utang yang akan dilakukan dengan cara diangsur dan juga mengelompokkan para kreditur menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah piutang yang dimiliki. Jumlah kreditur yang terverifikasi berjumlah 24 kreditur konkuren dengan jumlah utang sebesar Rp. 141.184.788.434.00 (seratus empat puluh miliar dua ratus tiga puluh empat rupiah) sedangkan jumlah utang kepada kreditur preferen yang dalam hal ini adalah karyawan PT IGN sebesar Rp. 5.076.233.224 (lima

miliar tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh empat rupiah). Utang tersebut dalam rencana perdamaian akan mulai dibayar pada bulan April hingga bulan Desember 2018. Dalam membayar utang-utangnya debitur memperoleh dana dari investor baru yang bersedia melunasi seluruh utang kepada para kreditur konkuren. Saat ini menurut kuasa pemohon utang tersebut telah selesai dilunasi oleh debitur.

B. Saran

1. Terkait dengan peraturan yang mengatur PKPU saat ini yakni UUK-PKPU. Sudah saatnya peraturan tersebut direvisi agar mampu menjamin kemudahan berbisnis di Indonesia. Dimulai dari syarat minimum kreditur yang dapat mengajukan permohonan PKPU yang harus ditambah hal ini bertujuan agar PKPU tidak dijadikan upaya dari kreditur untuk membunuh usaha debitur. Apabila jumlah minimal 2 kreditur yang dapat mengajukan permohonan PKPU maka ini dapat digunakan kreditur untuk mematikan usaha debitur dengan menampilkan citra buruk debitur di dunia bisnis. Ditambah lagi tidak ada batasan minimum utang yang dapat mengajukan permohonan PKPU.
2. Selanjutnya jangka waktu dalam PKPU seharusnya ditambah, hal ini dimaksudkan agar memudahkan hakim pengawas, pengurus dan para pihak untuk mencari jalan perdamaian dan juga lebih detail dalam membuat perjanjian perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Astara, I Wayan Wesna, *Hukum Kepailitan Teori dan Praktek*, (Denpasar, Warmadewa University Press, 2018.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta, PT Gelora Aksara Pratama, 2012
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kulitatif Analisi Kualitatif*, Jakarta: Rajawal Pers, 2012
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Prakek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- HR. Ibnu Majah no. 2410. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan shohih*
- Martokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Jakarta, Grafika, 2003.
- Rudy A, Lontoh, , dkk, *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001
- Shubhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008
- Situmorang Victor dan Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2009
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo, 1995
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1983.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005
- Suyatno, Anton, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Jakarta, Prenada Media Group, 2012
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002
- Wijaya, Andika & Wida Peace Ananta, *Hukum Acara Pengadilan Niaga Practical Guide to The Commercial Court*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018

Penelitian, Jurnal dan Artikel

- Casnova, Febri Yanti, *Analisis Putusan Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Pencegah Terjadinya Kepailitan (Studi Putusan No. 59/pdt.sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst)*, Skripsi: Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017
- Ishak, *Perdamaian Antara Debitur dan Kreditur Konkuren dalam Kepailitan*, Kanun Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016
- Rahmadani, Rifki, *Akibat Hukum Bagi Kreditur dalam Kasus (PT. First Trave)l Ditinjau dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 105/Pdt.SUS-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018
- Rahmadiyanti, Rindy Ayu, “Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur Oleh Kreditur Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Notarius*, Edisi 8, No. 2 (September, 2015)..E-Journal Undip
- Saraswati, Desty Ayu, *Tinjauan Yuridis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Koperasi Simpan Pinjam Mitradana Semarang (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg)*, Skripsi, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Siregar, Nien Rafles, Seminar Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Prespektif Kurator dan Pengurus, 5 Juli 2019

Internet

- <http://www.pn-semarangkota.go.id/images/stories/2017/Rencana%20Strategis%202015-2019-.pdf> diakses pada tanggal 4 September 2019
- http://www.pn-semarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=53&lang=id, diakses 13 September 2019
- http://www.pn-semarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=49&lang=id diakses pada tanggal 4 September 2019
- http://www.pn-semarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=48&lang=id Diakses Pada Tanggal 3 September 2019
- <http://www.pn-tanahgrogot.go.id/pengertian-peradilan/layanan-informasi-publik/pengertian-peradilan>, diakses pada tanggal 4 september 2019
- <https://radarpekalongan.co.id/45509/tiga-tahun-mandeg-pabrik-gula-kendal-kembali-beroperasi/>, diakses pada tanggal September 2019
- <https://radarpekalongan.co.id/5321/5-bulan-belum-gaji-karyawan-pt-ign-terancam-bangkrut/> diakses pada tanggal 29 september 2019
- <http://www.pn-semarangkota.go.id> diakses pada tanggal 22 September 2019
- <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/1/triangulasi.pdf>, diakses pada tanggal 20 Oktober, 2019

Peraturan dan Ketentuan

Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999 tentang pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.

Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999 tentang pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Acara Perdata Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan

Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering S.1847-52 jo 1849-63*)

Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buifengewesten, Staatsblad 1927: 227*)

Reglemen Indonesia yang diperbarui (*het herzine indonesisch Reglemen, Staatsblad 1926: 559 juncto Staatsblad 1941:44*)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang perseroan Terbatas

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Putusan Homologasi

PUTUSAN

Nomor : 9/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Smg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan PKPU pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

CHRIST SETIAWAN, Direktur Utama PT. Mitra Setia Jaya, beralamat di Jl. Gajah No.28, Kav. Ruko B 9 Semarang,

Yang dalam hal ini Pemohon PKPU memilih domisili hukum di Kantor Advokat dan Pengacara "SAKSONO YUDIANTORO, SH.MH & ASSOCIATES ", beralamat di Jl. Batan Selatan No. 20 Semarang, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2017, yang selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon PKPU

Terhadap

PT. INDUSTRI GULA NUSANTARA, Jl. Soekarno Hatta Barat KM-6 Cepiring Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon PKPU;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut;

Telah membaca Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 9/Pdt.Sus-PKPU/2017/PNSmg tanggal 4 Oktober 2017;

Telah membaca Berita Acara rapat Kreditur perkara Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN,Smg. tanggal 4 Oktober 2017 tentang Hasil Pemungutan Suara/Voting terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor terhadap para Kreditornya ;

Telah membaca Laporan Hakim Pengawas tanggal 15 Desember 2017 tentang Rekomendasi PT> Industri Gula Nusantara (Dalam PKPU) ;

Industri Gula Nusantara (dalam PKPU), maka dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

- a. *Bahwa Hakim Pengawas telah melihat dan meneliti laporan hasil pemungutan suara yang dibuat oleh Tim Pengurus berikut juga Berita Acara hasil rapat Pemungutan Suara.*
- b. *Bahwa Debitor beritikad baik dengan mengajukan proposal perdamaian yang sangat visible untuk diterima oleh para Kreditornya.*
- c. *Bahwa telah dilakukan pembahasan atas proposal perdamaian yang mana pada intinya mayoritas Kreditor menyetujui proposal perdamaian yang disampaikan oleh Debitor. (*
- d. *Tim Pengurus telah melakukan proses pemungutan suara atas rencana perdamaian dimana hasil yang didapat atas pemungutan suara tersebut dengan perhitungan 70 % kreditor telah menyetujui proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor.*
- e. *Bahwa antara Kreditor dengan Debitor ternyata telah terjadi perdamaian dengan membuat akta perjanjian*
- f. *Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada perkara PKPU No: 9/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN.Smg, agar Akta kesepatan perdamaian untuk dapat kiranya mempertimbangkan di terima dan di Homologasi ;*

Menimbang, bahwa Tim Pengurus pada tanggal 16 Desember 2016 telah memberikan Laporan Hasil Rapat Panitia Kreditor dengan Debitor PKPU yang diwakili oleh Pengurusnya yang pada pokoknya antara Kreditor telah terjadi perdamaian yang dituangkan dalam *Akta kesepatan perdamaian (Homologasi) perkara No,9/Odt,Sus.PKPU/2017/PN,Niaga Smg yang buat dan disepakati didepan Hakim Pemngawas dan didepan Pengurus pada tanggal 11 Desember 2017 ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Pengawas dan Tim Pengurus, masing masing tanggal 14 Desember 2017, 16 Desember 2016 ternyata antara Pihak Termohon PKPU dan Pihak Pemohon PKPU telah melakukan rapat rapat Kreditor dan terakhir rapat kreditor pada tanggal 11 Desember 2017 yang hadir oleh Pemohon PKPU, Termohon PKPU dan para Kreditor dan dalam Rapat tersebut telah tercapai kesepakatan perdamaian

Menimbang, bahwa pada dasarnya dengan dikabulkannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), terkandung makna bahwa Pemohon/Debitor bermaksud untuk mengajukan rencana perdamaian, yang dapat berupa penawaran pembayaran seluruhnya atau sebagian utang-utangnya kepada kreditor-kreditornya, disertai dengan jadwal dan jangka waktu pembayarannya;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini Termohon/Debitor telah ternyata mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditornya, untuk mendapatkan persetujuan;

Menimbang, bahwa rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon / Debitor a quo, telah mendapatkan persetujuan dari para kreditornya melalui pemungutan suara dengan hasil 70 % para Kreditur mendukung untuk perdamaian

Menimbang, bahwa atas dasar hasil pemungutan suara mayoritas Kreditor menerima rencana perdamaian, maka status rencana perdamaian berubah menjadi Perjanjian Perdamaian;

Menimbang, bahwa Perjanjian Perdamaian yang diterima oleh para kreditor, dan telah ternyata ditandatangani oleh Kreditor, Debitor dan dilaksanakan dihadapan Hakim Pengawas dan Tiem Pengurus ..yang isinya sebagaimana aktanya terlampir, adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun draf perdamaian yang diajukan oleh Debitor kepada Kreditur dan telah diterima oleh Rapat Kreditur pada tanggal 11 Desember 2017 adalah, sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

1. Profil Perusahaan

PT Industri Gula Nusantara ("PT IGN") suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Kendal, didirikan berdasarkan Akta Pernyataan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT IGN No. 9 tanggal 16 Februari 2009 dibuat dihadapan Ella Goei, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang. Maksud dan tujuan PT IGN adalah menyelenggarakan usaha di bidang industri gula dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PT IGN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Melakukan impor *raw sugar*.
- b. Mengolah *raw sugar* menjadi gula putih.

- c. Mengolah tebu menjadi gula putih.
- d. Memasarkan gula putih dan hasil produksi lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.
- e. Menjalankan usaha lain yang menunjang usahanya.

Visi PT IGN adalah menjadikan PT Industri Gula Nusantara sebagai industri gula berbasis tebu yang terbaik di Indonesia dengan kebijakan tebu yang mawas kesejahteraan petani tebu dan Raw Sugar yang berwawasan global, sedangkan misi PT IGN adalah memproduksi gula kristal putih secara efisien untuk mendukung kebutuhan konsumsi gula Nasional dalam rangka ikut mewujudkan swa sembada gula di Indonesia.

Saat ini pemegang saham PT IGN adalah PT Multi Manis Mandiri selaku pemilik 64% (enam puluh empat persen) saham atau sebanyak 94.850 (Sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh) lembar saham dan PT Perkebunan Nusantara IX selaku pemilik 36% (tiga puluh enam persen) saham atau sebanyak 52.370 (lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh) lembar saham.

2. Kegiatan Usaha PT IGN

Pabrik PT IGN mempunyai kapasitas giling ideal sekitar 1600 TCD. Kondisi peralatan relatif baik dan siap untuk operasional giling tebu maupun untuk mengolah Raw Sugar, peralatan tambahan (*asesori*) yg harus disesuaikan relatif tidak terlalu banyak, namun terkendala dikarenakan sebagian diantaranya adalah barang impor. Sehingga butuh cukup waktu dalam proses pengadaannya, kecuali ada rekanan yang mempunyai barang dimaksud dalam kondisi *ready*.

Pada tahun 2012, PT IGN pernah melakukan *dual operation* yaitu menggiling tebu sekaligus mengolah Raw Sugar dengan cara *melting*. Lama hari giling lk 150 hari. Jumlah Tebu yg digiling lebih dari 200.000 Ton. Sedangkan jumlah Raw Sugar yg diolah lebih dari 140.000 Ton. Dual proses ini membawa banyak keuntungan bagi PT IGN karena biaya bahan bakar untuk pengolahan relatif murah. Sebab tersedia cukup ampas untuk menjadi bahan bakar untuk prosesing tidak hanya nira dari giling Tebu tetapi juga untuk kepentingan *Processing Raw Sugar*. Rendemen rata-rata yang dicapaipun terbilang baik untuk Jawa Tengah, yaitu 7,5%, sedangkan rata - rata olah Raw Sugar per hari 800 Ton lebih. PT IGN mendapatkan fasilitas ijin impor raw sugar selama 5 tahun mulai 2009 sampai 2013 serta mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Permasalahan utama PT IGN saat ini dikarenakan PT IGN tidak lagi mendapatkan impor Raw Sugar. Dengan tidak adanya Import

Raw Sugar dalam proses giling PT IGN, membuat PT IGN tidak dapat beroperasi secara optimal.

Latar Belakang Proposal Perdamaian

Bahwa pada tanggal 14 September 2017 telah didaftarkan pengajuan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") terhadap PT IGN berdasarkan surat tertanggal 7 September 2017. Permohonan PKPU tersebut diajukan oleh PT Mitra Setia Jaya. Hal ini dilakukan dikarenakan PT IGN tidak dapat melakukan pelunasan atas utangnya kepada PT Mitra Setia Jaya yang sudah jatuh tempo.

Sebelumnya telah dibuat kesepakatan bayar yang dilegalisasi oleh notaris dengan jatuh tempo lima belas hari kerja sejak 19 April 2017 dibayar tunai dan sekaligus tetapi sudah jatuh tempo, namun PT IGN tetap tidak bisa melunasi tagihannya. Untuk memenuhi persyaratan PKPU maka PT Mitra Setia Jaya bersama PT Nusantara Tour mengajukan permohonan PKPU. Konsekuensi dari pengajuan PKPU tersebut, maka PT IGN harus atau wajib melaksanakan hal-hal sebagaimana berikut:

- a. Bekerjasama dengan pengurus yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Niaga terutama untuk menemukan skema terbaik dalam penyelesaian proses PKPU.
- b. Mengajukan usulan restrukturisasi kewajiban kepada semua kreditur yang dimiliki oleh PT IGN, berdasarkan prospek usaha yang dimiliki dalam jangka waktu yang disetujui oleh hakim pengawas.

Maksud dan Tujuan Proposal Perdamaian

Maksud dan tujuan disusunnya proposal perdamaian atas PKPU oleh PT IGN adalah sebagai berikut:

- a. Proposal perdamaian ini adalah bentuk kongkrit tanggapan dan tanggung jawab PT IGN atas permohonan yang diajukan oleh PT Mitra Setia Jaya dan seluruh Kreditur yang telah mengajukan tagihan utangnya.
- b. Memberikan gambaran yang jelas kepada Kreditur tentang kondisi perusahaan saat ini, termasuk menggambarkan asset dan kewajiban PT IGN. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan rencana perdamaian dan jadwal pembayaran kepada para Kreditur sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.
- c. Bahwa proposal perdamaian ini untuk dimintakan persetujuan kepada para Kreditur dalam sidang homologasi perkara PKPU No. 9/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Smg yang direncanakan akan diselenggarakan pada 2017.

Langkah strategis Direksi PT IGN dalam menyelamatkan dan mempertahankan kegiatan operasional Perseroan adalah dengan melakukan pendekatan secara intensif terhadap Investor yang berpotensi untuk melakukan investasi dalam PT IGN agar PT IGN dapat kembali beroperasi dan dapat melakukan revitalisasi *on farm* serta melakukan pembayaran hutangnya kepada para Kreditur agar PT IGN terhindar dari kepailitan Calon investor yaitu PT Pasifik Agro Sentosa ("PAS") dan PT. Capital Inti Gula ("Capital"), melalui PAS, telah mengirimkan surat minat untuk dapat berinvestasi di PT IGN dalam surat tanggal 15 Agustus 2017 perihal Pernyataan Minat Investasi IGN. Surat minat tersebut telah ditanggapi oleh Direksi PT IGN berdasarkan Surat No.020/IGN-PAS/X/2017 tertanggal 25 Oktober 2017 yang juga didukung oleh para pemegang saham PT IGN dan PAS sudah mengirimkan kembali suratnya dengan nomor : 135/EX-DIR/PAS-IGN/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 dalam suratnya tersebut, PAS menyampaikan rencana investasinya dalam PT IGN melalui proses *Right Issue* beserta komposisi pemegang saham, yang akan dilakukan setelah PAS melakukan proses *due diligence* dan memperoleh keyakinan atas investasinya dalam PT IGN.

BAB II

KONDISI PERUSAHAAN

1. Kondisi Perusahaan Saat Ini

Kondisi PT IGN secara garis besar dari aspek operasional/pabrikasi, ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia dan kondisi finansial bisa diuraikan sebagaimana berikut.

- a. Pabrik PT IGN praktis siap beroperasi, baik untuk menggiling Tebu maupun untuk mengolah Raw Sugar, baik secara sendiri-sendiri maupun gabungan keduanya. Kondisi pabrik dalam keadaan baik. Bahwa perlu ada penyesuaian atau perbaikan-perbaikan peralatan penunjang (*asesories*) merupakan hal yang sangat lumrah. Hanya saja perlu waktu minimal 4 bulan untuk penyediaannya dikarenakan sebagian besar merupakan barang-barang impor.
- b. Tebu sebagai bahan utama untuk digiling, praktis tergantung kepada petani. PT IGN sudah tidak punya Tebu Sendiri (TS) sejak tahun 2014. Kedudukan TS sangat strategis bagi PT IGN atau pabrik gula pada umumnya, karena sangat memudahkan untuk membuat *setting* perencanaan pasokan bahan baku harian yang sesuai kapasitas dan menghasilkan hasil gula ideal.
- c. Kekurangan Tebu dari TS biasanya diambilkan dari Tebu milik Petani secara bagi hasil (dengan pembinaan jauh sebelumnya) ataupun



- sebelum ini putus. Untuk hal ini harus tersedia dana yang cukup pada waktu yang tepat. Untuk memenuhi halnya, PT IGN saat ini tidak memiliki kemampuan atas ketersediaan dana tersebut.
- d. Bahan baku aktifitas operasional lainnya adalah Raw Sugar Raw Sugar diperoleh dari impor.
 - e. Dana Pengembangan Tebu Rakyat per hektarnya cukup besar. Diperlukan paling tidak 60 juta per ha sejak tanam sampai dengan jadi gula (termasuk biaya sewa lahan). Sehingga untuk mer. bangun TS tiap 100 ha akan butuh biaya Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah). Idealnya PT IGN mempunyai TS sekitar 2000 ha.
 - f. Kondisi riil yang ada, disamping tidak tersedianya TS, belum mendapatkan ijin impor Raw Sugar kembali dikarenakan ijin impor Raw Sugar telah habis pada tahun 2013.
 - g. Sumber Daya Manusia di PT IGN terdiri dari Manajemen (Board of Directors/BOD dan Board of Comissioners/BOC), Karyawan Pimpinan dan Karyawan Pelaksana.
Saat ini hanya terdapat perwakilan 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang komisaris. Namun Jumlah Karyawan masih sangat tinggi, yaitu sebanyak 319 orang. Jumlah Karyawan yang sangat banyak bagi PT IGN yang tidak operasional ini yang sangat menjadi beban, dikarenakan biaya rutin bulanan mencapai lebih dari 1,2 Miliar.

2. Asset Perusahaan

Berikut ini ringkasan daftar aktiva tetap PT IGN per bulan Oktober 2017, yakni sebagai berikut:

| No. | Asset | Nilai (Rp) |
|-------|--------------------------|--------------------|
| 1. | Kendaraan dan Inventaris | 10,904,072,728.69 |
| 2. | Mesin dan Peralatan | 284,834,784,233.19 |
| 3. | Tanah dan Bangunan | 101,065,089,987.65 |
| Total | | 396,803,946,949.53 |

BAB III

PROYEKSI DAN PERDAMAIAN

V pada prinsipnya PT IGN sangat prospektif, khususnya selama ini dapat merealisasikan dual action yaitu menggiling tebu dan mengolah Raw Sugar pada tahun yang bersamaan. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebagaimana berikut:

- Hari giling selama 150 (seratus lima puluh hari) untuk giling tebu,
- Raw Sugar yang diperoleh minimal sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) Ton/Tahun, yang dapat diolah saat DMG (Dalam Masa Giling) ataupun LMG (Luar Masa Giling);
- Kapasitas 1.600 TCD;
- Dalam hal mengolah Raw Sugar pada saat DMG, maka pemanfaatan bahan bakar lebih efisien;
- Produk yang dihasilkan terjual seluruhnya.

Dengan kendali yang baik atas hal-hal sebagaimana disebutkan diatas, proyeksi aktivitas diperkirakan sebagaimana berikut:

| No | Tahun | Luas TS | Areal TR (Ha) | Produktivita s /ha | Jumlah Tebu (Ton) | Rendeme n % | |
|----|-------|------------|------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|--------|
| 1 | 2018 | - | 2800 | 75 T | 210.000 | 7 | 14.700 |
| 2 | 2019 | 500 | 2400 | 80 T | 192.000 | 7 | 13.440 |
| 3 | 2020 | 100 | 2500 | 85 T | 212.500 | 7 | 14.875 |
| 4 | 2021 | 1500 | 2000 | 85 T | 170.000 | 7 | 11.900 |
| 5 | 2022 | 2000 | 1250 | 90 T | 112.500 | 7 | 7.875 |

2. Rencana Perdamaian

Tagihan utang PT IGN berdasarkan hasil pendaftaran tagihan para Kreditur kepada Pengurus PKPU mencapai sebesar Rp 141.284.788.434,00 (seratus empat puluh satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), sesuai dengan Rapat Verifikasi Piutang Kreditur pada tanggal 3 November 2017 ("Tagihan Kreditur Terverifikasi").

Berdasarkan hasil proyeksi pendapatan dan Tagihan Kreditur Sementara, perusahaan menawarkan rencana perdamaian sebagai berikut:

Kreditur Separatis, bahwa tidak terdapat tagihan dari kreditur separatis.

- Kreditur Preferen yaitu Karyawan PT IGN sejumlah 317 (tiga ratus tujuh belas) karyawan dengan kewajiban sebesar Rp5.076.233.224 (lima miliar tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) akan dibayarkan seluruhnya pada tanggal 1 April 2018.

Kreditur Konkuren cara pembayarannya dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yang cara pembayarannya dicicil dimulai pada bulan April 2018, yaitu sebagai berikut:

- i. Jumlah utang sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) sebesar Rp. 641.767.109,00 (enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan) akan dibayarkan seluruhnya pada tanggal 1 April 2018, antara lain:

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Sutrasta Pratama | Rp. 4.356.000,00 |
| Setono Rubber Teknik | Rp. 17.700.000,00 |
| Selekta Kencana | Rp. 20.495.200,00 |
| PT Puji Lestari Purnama | Rp. 59.664.000,00 |
| Nusatovel (Tiket/Travel) | Rp. 67.426.000,00 |
| CV EM Power | Rp. 85.179.160,00 |
| YUHRI | Rp. 119.600.000,00 |
| CV Naora Sejati | Rp. 121.009.249,00 |
| CV Sidqi Adiyatma | Rp. 146.337.500,00 |

- ii. Jumlah utang di bawah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah), yaitu sebesar Rp. 61.929.820.937,00 (enam puluh satu miliar Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) ("**Total Kreditur Konkuren**") akan dicicil sebanyak 4 (empat) kali pembayaran dalam kurun waktu 8 (delapan) bulan, dengan jadwal sebagai berikut:

- a). Pembayaran sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari Total Kreditur Konkuren Tahap I atau sebanyak Rp. 19.286.797.000,00 akan dibayarkan pada tanggal 1 April 2018.

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Yunior Elok Sempurna | Rp. 92.383.500,00 |
| Pancamanunggal Wiradinamika | Rp. 110.020.625,00 |
| Dipo Joyo Associate | Rp. 247.488.045,00 |
| PTPN IX | Rp. 397.219.918,00 |
| Sumber Abadi Energindo | Rp. 879.463.500,00 |
| BPJS Ketenagakerjaan | Rp. 432.997.714,00 |
| Pangan Abadi | Rp. 1.150.000.000,00 |
| Mentari Agung Jaya Usaha/ Yulisman | Rp. 1.260.063.300,00 |
| PT Mitra Setia Jaya | Rp. 1.349.263.988,00 |
| Garuda Mas Transindo/ Bambang | Rp. 2.430.000.000,00 |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Tikno | Rp. 2.537.551.360,00 |
| Sederhana Makmur Utama/ Bp. | |
| Anen | Rp. 2.823.145.454,00 |
| Teka Karya Barutama | Rp. 232.920.038,00 |
| Bhanda Ghara Reksa | Rp. 143.831.089,00 |
| Golden Pratama Gemilang | Rp. 124.215.245,00 |

- b). Pembayaran sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari Total Kreditur Konkuren atau sebanyak Rp. 17.657.235.961,00 akan dibayarkan pada tanggal 1 Juni 2018

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Yunior Elok Sempurna | Rp. 110.860.200,00 |
| Pancamanunggal Wiradinamika | Rp. 132.024.750,00 |
| Dipo Joyo Associate | Rp. 296.985.654,00 |
| PTPN IX | Rp. 476.663.901,00 |
| Sumber Abadi Energindo | Rp. 1.055.356.200,00 |
| BPJS Ketenagakerjaan | Rp. 564.779.627,00 |
| Pangan Abadi | Rp. 1.380.000.000,00 |
| Mentari Agung Jaya Usaha/ Yulisman | Rp. 1.512.075.960,00 |
| PT Mitra Setia Jaya | Rp. 1.619.116.785,00 |
| Garuda Mas Transindo/ Bambang | Rp. 2.916.000.000,00 |
| Wijayatama Langgeng perkasa/ Tikno | Rp. 3.303.849.600,00 |
| Sederhana Makmur Utama/ Bp. | |
| Anen | Rp. 3.682.363.636,00 |
| Teka Karya Barutama | Rp. 279.504.046,00 |
| Bhanda Ghara Reksa | Rp. 172.597.307,00 |
| Golden Pratama Gemilang | Rp. 149.058.294,00 |

- c). Pembayaran sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari Total Kreditur Konkuren atau sebanyak Rp. 17.657.235.961,00 akan dibayarkan pada tanggal 1 Agustus 2018

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Yunior Elok Sempurna | Rp. 110.860.200,00 |
| Pncamanunggal Wiradinamika | Rp. 132.024.750,00 |
| Dipo Joyo Associate | Rp. 296.995.654,00 |
| PTPN IX | Rp. 476.663.901,00 |
| Sumber Abadi Energindo | Rp. 1.055.356.200,00 |
| BPJS Ketenagakerjaan | Rp. 564.779.627,00 |
| Pangan Abadi | Rp. 1.380.000.000,00 |

| | |
|---|----------------------|
| Mentari Agung Jaya Usaha/ Yulisman | Rp. 1.512.075.960,00 |
| PT Mitra Setia Jaya | Rp. 1.619.116.785,00 |
| Garuda Mas Transindo/ Bambang Wijayatama | Rp. 2.916.000.000,00 |
| Langgengperkasa/ Tikno | Rp. 3.309.849.600,00 |
| Sederhana Makmur Utama/ Bp. Anen | Rp. 3.682.363.636,00 |
| Teka Karya Barutama | Rp. 279.504.046,00 |
| Bhanda Ghara Rekso | Rp. 172.597.307,00 |
| Golden Pratama Gemilang | Rp. 149.058.294,00 |
| d). Pembayaran sebanyak 15% (lima belas persen) dari Total Kreditur Konkuren atau sebanyak Rp. 9.332.417.505,00 akan dibayarkan pada tanggal 1 Oktober 2018 | |
| Yunior Elok Sempurna | Rp. 55.430.100,00 |
| Pancamanunggal Wiradinamika | Rp. 66.012.375,00 |
| Dipo Joyo Associate | Rp. 148.492.827,00 |
| PTPN IX | Rp. 238.331.951,00 |
| Sumber Abadi Energindo | Rp. 527.678.100,00 |
| BPJS Ketenagakerjaan | Rp. 320.041.789,00 |
| Pangan Abadi | Rp. 690.000.000,00 |
| Mentari Agung Jaya Usaha/ Yulisman | Rp. 756.037.980,00 |
| PT Mitra Setia Jaya | Rp. 809.558.393,00 |
| Garuda Mas Transindo/ Bambang Wijayatama | Rp. 1.458.000.000,00 |
| Langgengperkasa/ Tikno | Rp. 1.875.581.440,00 |
| Sederhana Makmur Utama/ Bp. Anen | Rp. 2.086.672.727,00 |
| Teka Karya Barutama | Rp. 139.752.023,00 |
| Bhanda Ghara Rekso | Rp. 86.298.654,00 |
| Golden Pratama Gemilang | Rp. 74.529.147,00 |

iii. Jumlah utang di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) yaitu sebesar Rp. 76.709.334.899,00 (tujuh puluh enam miliar tujuh ratus sembilan tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) akan dibayarkan seluruhnya pada tanggal 1 Desember 2018, antara lain:

| | |
|--------------------|----------------------|
| Arbeska Mitra Jaya | Rp.18,191,656,635,00 |
| Tetap Jaya | Rp.58,517,678,264,00 |

Menimbang, bahwa berdasarkan pada akta perdamaian sebagai mana tersebut diatas adakah fakta-fakta hukum yang menunjukkan adanya alasan-alasan tersebut huruf a, b, c dan d. sehingga terdapat alasan hukum bagi Pengadilan untuk menolak pengesahan perdamaian a quo, terhadap hal ini akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah hal-hal tersebut huruf a, b, c dan d sebagaimana tersebut dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, terlebih dahulu harus ada pihak yang mendailkannya disertai bukti yang cukup, untuk selanjutnya Pengadilan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa ternyata dalam rapat kreditur dengan Debitor PKPU tanggal 11 Desember 2017 Para Kreditor dapat menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak terdapat alasan yang kuat untuk menyatakan menolak mengesahkan Akta Perjanjian Perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 285 ayat (2) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka dengan berpedoman ketentuan pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian a quo;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Pengadilan yang mengesahkan Perjanjian Perdamaian a quo, maka mutatis mutandis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi berakhir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan materi (isi) Perjanjian Perdamaian, hal mengenai imbalan jasa Tim Pengurus telah ada kesanggupan Debitor untuk memenuhinya, atas dasar itu maka Pengadilan akan menetapkan kemucian;

Menimbang, bahwa perihal biaya perkara ini dibebankan kepada Debitor ;

Mengingat ketentuan Pasal 281 ayat (1), (2); Pasal 284 ayat (1); Pasal 286 dan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), beserta ketentuan lain yang bersangkutan dengan ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan sah Kesepakatan dan Perdamaian PT Industri Gula Nusantara (Homologasi) dengan para Kreditornya,
2. Menghukum Debitor/Termohon dan para Kreditor untuk mentaati Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan;

3. Menyatakan imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian.
4. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.411.000.- (tiga Juta empat ratus sebelas ribu rupiah)

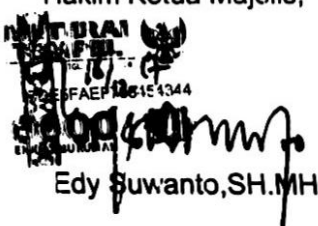
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang., pada hari . . Senin tanggal .18 Desember 2017 oleh kami, Edy Suwanto. SH.MH., sebagai Hakim Ketua, .Pudjo Hunggul HW, SH.MH. dan Wismonoto. SH..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor 09Pid.Sus .PKPU / 2017 /PN.Niaga Smg tanggal 16 September 2017 putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Afdlori, SH. Panitera Pengganti dan di hadiri Kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon.dan para Kreditur

Hakim-hakim Anggota,


Pudjo Hunggul HW, SH.MH.


Wismonoto, SH...

Hakim Ketua Majelis,


Edy Suwanto, SH.MH.

Panitera Pengganti,


Afdlori, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....,Rp.2.000.000,00
2. Materai Rp 6.000,00
3. Proses..... Rp 50.000,00

B. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Wawancara dengan Edy Suwanto SH. MH (Ketua Majelis Hakim)
 - a. Seberapa sering bapak menangani perkara yang permohonannya datang dari pihak kreditur?
 - b. Hukum acara apa yang dipakai dalam menangani perkara PKPU?
 - c. Asas-asas apa saja yang diterapkan dalam menangani perkara PKPU?
 - d. Apa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana dalam perkara PKPU?
 - e. Bagaimana kontribusi hakim pengawas dan pengurus dalam perkara ini?
 - f. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini?
 - g. Bagaimana pendapat bapak mengenai asas berpekerja biaya murah dalam perkara PKPU?
 - h. Apakah bapak pernah menjadi hakim pengawas, dan bagaimana cara kerja hakim pengawas?
2. Wawancara dengan Afdlori SH. MH (Panitera Muda)
 - a. Seberapa sering bapak menangani perkara PKPU yang permohonannya datang dari pihak kreditur?
 - b. Menurut bapak kenapa kreditur lebih tertarik mengajukan permohonan PKPU ketimbang permohonan kepailitan?
 - c. Dalam perkara PKPU hukum acara apa yang dipakai oleh Pengadilan Niaga Semarang?
 - d. Berapa kali proses persidangan perkara ini hingga akhirnya sidang pembacaan putusan?
 - e. Apa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana dalam perkara PKPU?
 - f. Apa bapak ikut terlibat dalam proses PKPU sementara?
 - g. Apa yang membuat kreditur sepakat dengan proposal perdamaian yang diajukan debitur?


- h. Bagaimana cara menjamin dana yang digunakan debitur untuk melunasi utang-utangnya?
3. Slamet Rijadi SH (Kuasa Hukum Pemohon)
- a. Kenapa bapak lebih memilih menyelesaikan utang melalui PKPU?
 - b. Dalam perkara hukum acara apa yang dipakai selama persidangan?
 - c. Berapa kali dilaksanakan sidang hingga akhirnya sidang putusan?
 - d. Apa isi proposal perdamaian yang diajukan oleh pihak debitur?
 - e. Menurut bapak apa yang membuat majelis hakim mengabulkan permohonan PKPU?
 - f. Bagaimana kontribusi hakim pengawas dan pengurus dalam perkara ini?
 - g. Apa yang membuat kreditur setuju dengan proposal perdamaian yang diajukan debitur?
4. Agus Suhartoyo SH (Kuasa Hukum Pemohon)
- a. Kenapa dalam hal penyelain utang piutang lebih memilih upaya hukum PKPU dari pada upaya hukum lain?
 - b. Apakah saat ini piutang kreditur telah dilunasi oleh debitur?
 - c. Bagaimana cara debitur memperoleh dana untuk melunasi utang-utangnya?

C. Foto Kegiatan Wawancara





D. Dokumen Penunjang

| | |
|---|--|
|  | PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HUBUNGAN INDUSTRIAL / TIPIKOR S E M A R A N G Jl. Siliwangi No. 512 Semarang TELP. 024 - 7604045, 7604066 FAX. 024 - 7604041 S E M A R A N G - 50148 |
|---|--|

| | |
|----------|-----------------------------------|
| Nomor | : 67 / Rst / 2019 |
| Lampiran | : --- |
| Perihal | : Surat Keterangan Riset ----- |

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang menerangkan :

| | |
|-------------------------|--|
| N a m a | : AHMAD DIHA'UL KHOIRI |
| N I M | : 1502056016 |
| Perguruan Tinggi | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG |
| Alamat Perguruan Tinggi | : Jalan Prof. Dr. H. Hamka, Semarang. |


Telah melakukan penelitian dan atau / Interview di Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang mulai tanggal, 16 September 2019 sampai dengan tanggal, 08 Oktober 2019 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul:

“ ANALISIS PUTUSAN HOMOLOGASI ATAS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg) “

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| | |
|----------------|-------------------|
| Dikeluarkan di | : SEMARANG |
| Pada tanggal | : 08 Oktober 2016 |

Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial/ Tipikor
Semarang
Koordinator K.K.L.,


ANDI ASTARA, SH. MH.
NIP. 19610720 198803 1 005

SURAT KETERANGAN RISET

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saksono Yudiantoro, S.H., M.H

Jabatan : Pimpinan Kantor Advokat Saksono Yudiantoro, S.H, M,H & Associates

Bersama ini kami sampaikan bahwa:

Nama : Ahmad Diha'ul Khoiri

Nim :1502056016

Universitas :Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Adalah benar telah melakukan penelitian, wawancara dan mendapatkan salinan dokumen dalam rangka penulisan skirpsiyang berjudul ***“Analisis Putusan Homologasi Atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg)”*** sejak tanggal 17 Sepetember sampai 1 Oktober 2019 dan telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 1 Oktober 2019



Saksono Yudiantoro S.H.,MH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-2378/Un.10.1/D1/TL.01/7/2019

Semarang, 12 Juli 2019

Lampiran : -

Hal : Surat Pengantar Ijin Pra Riset

Yth.

Direktur Utama PT. Industri Gula Nusantara

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

Nama : Ahmad Diha'ul Khoiri

NIM : 1502056016

Jurusan : Ilmu Hukum

Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

**"EFEKTIVITAS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA ATAS PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG DALAM PERKARA KEPAILITAN TERHADAP EKSISTENSI
PERUSAHAAN (STUDI KASUS DI PT INDUSTRI GULA NUSANTARA)"**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n. Dekan

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

CONTACT PERSON:
() Ahmad Diha'ul Khoiri



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-3361/Un.10.1/D1/TL.01/9/2019
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Semarang, 12 September 2019

Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Ahmad Diha'ul Khoiri
N I M : 1502056016
Jurusan : Ilmu Hukum

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"ANALISIS PUTUSAN HOMOLOGASI ATAS PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN
Niaga Smg)"**

Dosen Pembimbing I : Drs. Sahidin, M.Si
Dosen Pembimbing II : Siti Rofi'ah, MH., M.Si.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.


Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron 

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
() Ahmad Diha'ul Khoiri

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Diha'ul Khoiri

Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 20 Januari 1997

Alamat Asal : RT3/RW1, Desa Sulang, Kecamatan Sulang,
Kabupaten Rembang

Alamat Domisili : Kliwonan Timur RT7/RW3 Nomor 34
Tambakaji, Ngaliyan Semarang

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 1 Sulang Tahun Lulus 2009
2. SMP Negeri 1 Sulang Tahun Lulus 2012
3. SMA Negeri 1 Sulang Tahun Lulus 2015

Motivasi Hidup : Harta, Tahta, Surga dan Nilai A

Media Komunikasi

1. 0852 8080 7473
2. ahmaddihaul@gmail.com
3. ahmaddihaul@yahoo.co.id

Semarang 16 Oktober 2019

Hormat Saya.

Ahmad Diha'ul Khoiri

